

**ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Oleh:

Sofiatul Dwi Anjarsari

NIM : G01218026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sofiatul Dwi Anjarsari

NIM : G01218026

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Sofiatul Dwi Anjarsari

NIM. G01218026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sofiatul Dwi Anjarsari NIM. G01218026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Mei 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BSU', written in a cursive style.

Betty Silfia Ayu Utami, S.E., M.S.E.

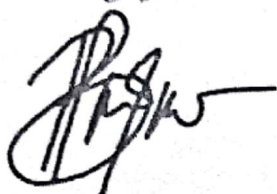
NIP. 198706102019032019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sofiatul Dwi Anjarsari NIM G01218026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Betty Silfia Ayu Utami, S.E., M.S.E.

NIP. 198706102019032019

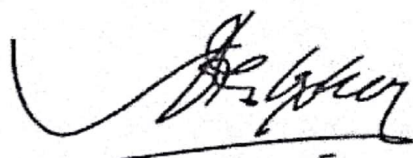
Penguji II



Dr. Lilik Rahmawati, M.E.I.

NIP. 198106062009012008

Penguji III



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.S.E.I.

NIP. 201603311

Penguji IV



Debby Nindya Istiandari, M.E.

NIP. 199512142022032002

Surabaya, 8 Juni 2022

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dekan,



Dr. H. Rizki Mi Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sofiatul Dwi Anjarsari
NIM : G01218026
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
E-mail address : atulsofi743@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016-2020**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Penulis

(
Sofiatul Dwi Anjarsari
)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020**” bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta variabel yang paling berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model *fixed effect model*. Data yang digunakan ialah data panel yang terdiri dari data tahun 2016 hingga 2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Data penelitian ini diperoleh melalui BPS, BPKAD, serta Portal Data DJPK Kementerian Keuangan. Data penelitian ini diolah dengan *software* Eviews 9.

Hasil persamaan regresi dalam penelitian ini sebesar $Y = 7086518 + 0,702068X_1 + 1,939619X_2 + 2,795557X_3 + 1,017404X_4 + \epsilon$. Pajak daerah berpengaruh terhadap PAD dengan hasil probabilitas sebesar 0,0001, retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD dengan hasil probabilitas sebesar 0,0002, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap PAD dengan hasil probabilitas sebesar 0,0003, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD dengan hasil probabilitas sebesar 0,0000, dan variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah paling berpengaruh terhadap PAD dengan nilai absolut elastisitas sebesar 0,435.

Adanya hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur memperluas sumber-sumber penerimaan pada PAD melalui identifikasi dan menetapkan besaran tarif penarikan daerah dengan menyesuaikan pada kondisi geografis daerah setempat serta menjalin kerja sama dengan *e-commerce* dan mitra jaringan *retail* untuk memudahkan masyarakat dalam membayar penarikan daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Landasan Teori	17
1. Otonomi Daerah.....	17
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
4. Hubungan Antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	27
5. Hubungan Antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	28
6. Hubungan Antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah	29
7. Hubungan Antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	29
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41

B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	41
D. Variabel Penelitian.....	42
E. Definisi Operasional.....	43
F. Data dan Sumber Data.....	46
1. Jenis Data.....	46
2. Sumber Data.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	47
H. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	63
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	63
B. Analisis Data.....	81
BAB V PEMBAHASAN.....	99
A. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	99
B. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	102
C. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	106
D. Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	109
E. Variabel yang Paling Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	112
F. Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021.....	114
BAB VI PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah).....	67
Grafik 4.2 Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah).....	70
Grafik 4.3 Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah) ...	73
Grafik 4.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)	76
Grafik 4.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah).....	80
Grafik 5.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 (Rupiah).....	115



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) Tahun 2018-2020.....	3
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2016-2018 (Rupiah).....	4
Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Pendapatan di Provinsi Jawa Timur (Rupiah) Tahun 2018-2020	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah).....	66
Tabel 4.2 Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah).....	69
Tabel 4.3 Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah) ..	73
Tabel 4.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah).....	76
Tabel 4.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)	79
Tabel 4.6 Uji Model <i>Common Effect</i>	82
Tabel 4.7 Uji Model <i>Fixed Effect</i>	83
Tabel 4.8 Uji Model <i>Random Effect</i>	84
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow	85
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman	86
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas	89
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas	89
Tabel 4.13 Hasil Uji Log Multikolinieritas.....	90
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	91
Tabel 4.15 Hasil Uji Log Heteroskedastisitas.....	92
Tabel 4.16 Hasil Uji Autokorelasi.....	93
Tabel 4.17 Hasil Uji Simultan (F)	93
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (t).....	94
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2	96
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Beta.....	97

Tabel 5.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016-2021 (Rupiah) 114



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satunya ialah adanya sumber-sumber pendapatan keuangan daerah yang memadai untuk mendanai pengelolaan otonomi sebuah daerah. Sejalan dengan putusan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Suatu wilayah mampu mengelola sistem keuangannya untuk menentukan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah guna melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintahan ialah menjalankan fasilitas publik dan mengembangkan sebuah ekonomi.¹

Untuk membuat sebuah daerah menjadi berkembang pada pembangunan daerah tersebut, pemerintah daerah wajib menggali sektor-sektor yang memiliki potensi pada daerah tersebut. Langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).²

¹Carunia Mulya Firdausy “Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional” (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) Hlm. 9

²Wahyu Apriani dkk et al. 2017. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016”. *Journal Of Accounting*, Vol 3, No. 3

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri tercermin pada bagaimana daerah tersebut mengelola PAD.

Pendapatan Asli Daerah atau dikenal dengan PAD ialah seluruh penerimaan yang didapatkan bagi sebuah wilayah yang bersumber dari basis-basis pada wilayah daerah sendiri yang didapatkan berdasarkan pada peraturan suatu daerah dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.³ Sektor penerimaan bagi suatu daerah berperan penting dikarenakan hal tersebut bisa digunakan untuk melihat bagaimana suatu daerah tersebut mampu dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah serta pengembangan ekonomi wilayah itu.⁴

Tujuan utama PAD ialah memberikan kepuasan dan mencukupi seluruh keperluan yang bersifat umum yang mempunyai hubungan dengan masyarakat luas.⁵ Tujuan ini bisa diperoleh dengan cara menyelenggarakan kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu daerah dengan menggunakan dana yang bersumber dari PAD. Terdapatnya permasalahan pada suatu daerah bisa diatasi dengan cara memanfaatkan PAD secara efektif seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Contohnya pada saat suatu daerah mengalami permasalahan pada pengangguran, daerah tersebut dapat

³Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia" (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2002) Hlm. 51

⁴Abdullah dan Halim. 2003. "Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia".Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 7, No. 1

⁵Ahmad Yani Op. Cit

membuat sebuah program atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran. Dengan begitu dana yang dipakai merupakan dana yang bersumber dari PAD.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) Tahun 2018-2020

Jenis Penerimaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	158.721.480.199	169.993.478.633	183.196.758.077
Pajak Daerah	136.095.291.940	144.039.477.959	157.267.369.388
Retribusi Daerah	1.581.850.373	1.773.258.727	2.040.156.535
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.647.165.336	4.265.866.248	4.342.331.768
Lain-lain PAD yang Sah	17.397.172.550	19.914.875.699	19.546.900.386

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2018-2020

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut realisasi penerimaan pemerintah provinsi seluruh Indonesia menurut jenis penerimaan tahun 2018-2020 dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Meskipun saat tahun 2020 Negara Indonesia terjadi wabah *Coronavirus Disease of 2019* (COVID-19) yang berdampak pada sektor ekonomi akan tetapi masih mampu bertahan dengan PAD sebanyak Rp183.196.758.077.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi
Pulau Jawa Tahun 2016-2018 (Rupiah)

Nama Provinsi	Tahun		
	2016	2017	2018
Provinsi Banten	12.242.868.000.000,00	14.711.440.000.000,00	14.673.802.000.000,00
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1.673.749.196.000,00	1.851.973.396.065,27	2.040.723.348.530,93
Provinsi DKI Jakarta	36.888.020.000.000,00	43.901.490.000.000,00	43.327.140.000.000,00
Provinsi Jawa Barat	17.042.895.113.672,00	18.081.123.739.824,30	19.642.915.448.763,78
Provinsi Jawa Timur	15.817.795.024.797,00	17.324.177.664.424,20	18.531.062.021.823,40
Provinsi Jawa Tengah	11.541.029.720.309,70	12.547.513.389.400,00	13.711.836.037.849,34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016-2018

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, realisasi penerimaan PAD menurut provinsi tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur menempati nomor ke-3 sesudah Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki capaian PAD paling banyak. Di mana, setiap tahunnya Provinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan dalam penerimaan PAD. Saat tahun 2018 Provinsi Jawa Timur memperoleh PAD sebesar Rp18.531.062.021.823,40. Hal tersebut sejalan dengan prediksi Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur jika PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 meningkat disebabkan adanya kontribusi yang cukup banyak dari hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.⁶

⁶Elvira Inda Sari, "Komisi C Optimis PAD Jatim 2018 Meningkatkan", (<https://infopublik.id>), pada 12 Februari 2022

Kemandirian suatu daerah tercermin dari besarnya pendapatan PAD. Semakin besar PAD yang diperoleh bagi suatu daerah maka daerah tersebut semakin mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Maka, hal tersebut merupakan capaian yang luar biasa sebagai provinsi mandiri akan penerimaan suatu daerah.⁷

Adanya UU mengenai otonomi daerah yang berlaku sejak tahun 2004 mengakibatkan hasil PAD menjadi meningkat. Pendapatan yang diperoleh suatu daerah mampu mencapai lebih dari jumlah anggaran yang dikirim oleh pemerintah pusat untuk setiap daerah. Pada saat sebelum terjadinya wabah COVID-19 tahun 2020 Provinsi Jawa Timur ialah salah satu provinsi yang mengalami kenaikan PAD setiap tahunnya. Adanya otonomi daerah memberikan ruang untuk berinovasi atau kreatifitas bagi daerah yang bertujuan untuk menggali penerimaan yang sebanyak-banyaknya pada daerah tersebut.⁸ Sehingga untuk menjadi daerah yang mandiri dalam menerima sumber keuangan daerah diharapkan masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur mampu berinovasi dan berpikir kreatif untuk menentukan regulasi secara tepat dan efektif yang berkaitan dengan PAD supaya membentuk daerah yang mandiri dan berkontribusi untuk pendapatan suatu negara.

⁷Cindi Oktavia & Nur Handayani. 2021. "Pengaruh PAD, *Tax Effort*, Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 10, No. 3

⁸Sania Mashabi, "25 Tahun Otonomi Daerah, Mendagri Sebut Banyak Daerah yang PAD Lebih Transfer Pusat", (<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/27/11502621/25-tahun-otonomi-daerah-mendagri-sebut-banyak-daerah-yang-pad-lebih>), pada 20 Desember 2021

Tabel 1.3

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Pendapatan di Provinsi Jawa Timur (Rupiah) Tahun 2018-2020

Jenis Penerimaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	18.531.062.021.823,40	19.327.125.485.405,90	17.951.235.057.953,00
Pajak Daerah	15.060.713.325.040,00	15.522.201.423.333,00	14.412.362.319.502,00
Retribusi Daerah	89.881.270.362,22	146.815.818.226,84	84.190.144.969,90
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	384.285.224.116,80	402.298.606.128,80	417.764.005.747,60
Lain-lain PAD yang Sah	2.996.182.202.304,35	3.255.809.637.717,81	3.036.918.587.733,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2018-2020

Berdasarkan tabel 1.3 mengenai realisasi pendapatan pemerintah provinsi menurut jenis pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020 bahwa kondisi PAD Provinsi Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi peningkatan dari Rp18.531.062.021,82 menjadi Rp19.327.125.485,40. Akan tetapi pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan PAD yang cukup drastis sebesar Rp17.951.235.057,95. Hal tersebut dikarenakan dampak dari kontraksi sektor ekonomi khususnya PAD yang disebabkan pandemi COVID-19. Meskipun PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 mengalami penurunan akan tetapi hal tersebut merupakan capaian yang cukup tinggi

jika dibandingkan dari target yang diperkirakan sebesar Rp15.448.000.000,00.⁹

Pendapatan asli daerah merupakan sebuah pendapatan bagi suatu daerah yang bersumber dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁰ Pajak daerah adalah salah satu penerimaan asli daerah yang memiliki fungsi yang sangat tepat guna mengembangkan kinerja keuangan suatu wilayah yang difungsikan untuk memenuhi keperluan yang diperlukan oleh suatu daerah guna mencapai kemakmuran untuk masyarakat pada suatu daerah.¹¹ Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan dalam pendapatan negara yang sifatnya penting untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi yang bersifat tingkat nasional dan penyelenggaraan pemerintah.¹² Penyebab pajak termasuk dalam PAD disebabkan karena perolehan yang berasal dari penarikan pajak dapat difungsikan untuk macam-macam pembiayaan daerah contohnya infrastruktur dan kebutuhan suatu daerah. Pajak ialah pemasukan negara yang dikatakan sangat berharga bagi suatu negara. Pemasukan pajak sebesar 70% menjadikan pajak sebagai salah satu penerimaan negara yang paling besar.¹³

⁹Dian Kurniawan, "Lebih Target, Realisasi Pendapatan Daerah Jatim 2020 Capai 104,94 Persen", (<https://surabaya.liputan6.com>), pada 12 Februari 2022

¹⁰Mardiasmo, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah" (Yogyakarta: Andi. 2002) Hlm 132

¹¹Theresia Woro Damayanti dan Supramono, "Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan" (Yogyakarta: Andi. 2005) Hlm 2

¹²Waluyo, "Perpajakan Indonesia Edisi 10" (Jakarta: Salemba Empat, 2011) Hlm 225

¹³Muhammad Bayu Tjahyono, "Reformasi Pajak Rakyat Dapat Apa", (www.pajak.go.id), pada 20 Desember 2021

Retribusi daerah ialah sebuah penarikan pada suatu wilayah yang berupa pembayaran atas pelayanan atau pemberian sebuah perizinan tertentu yang sudah diberikan atau difasilitasi sebagai imbalan akan penggunaan yang secara langsung diterima oleh seseorang atau badan.¹⁴ Penarikan retribusi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya ialah adanya fasilitas atau jasa berupa pelayanan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk perorangan atau badan. Sama dengan pajak, retribusi daerah merupakan sumber PAD yang cukup penting. Retribusi daerah ialah sumber penerimaan yang penting sebagai pemasukan PAD yang cukup berkontribusi terhadap adanya peningkatan PAD yang bersumber dari penarikan retribusi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Puja Rizky Ramadhan (2019) mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Sumatera Utara menjelaskan bahwa pada tahun 2016 hingga 2018 pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Maka dapat disimpulkan jika pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap PAD.¹⁵

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sebuah penerimaan bagi suatu wilayah yang bersumber dari perolehan dari

¹⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹⁵Puja Rizky Ramadhan. 2019. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara".Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi, Vol 5, No. 1

perusahaan yang dimiliki oleh daerah serta pengelolaan akan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹⁶ Pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang membahas mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil keuntungan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak ketiga.¹⁷

Badan usaha milik daerah terdiri dari sektor usaha, keuangan, migas, dan pelabuhan serta perusahaan daerah air bersih. Hal tersebut diperlukan perhatian yang khusus agar penerimaan tersebut bisa digali sebesar-besarnya yang hasil akhirnya akan digunakan kembali oleh masyarakat.¹⁸ Dengan banyaknya perusahaan milik daerah pada sebuah provinsi, secara tidak langsung merupakan bagian dari PAD yang merupakan peran penting guna membangun daerah untuk menjadi lebih baik lagi. Provinsi Jawa Timur yang merupakan pusat ekonomi maka tidak perlu diragukan lagi dalam memiliki perusahaan-perusahaan yang statusnya merupakan milik daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah sebuah penerimaan suatu wilayah yang bersumber dari lain-lain kepemilikan pemerintah daerah. Bentuk dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah pendapatan perdagangan aset sebuah wilayah yang tidak dipisahkan, jasa

¹⁶Abdul Halim, "Akuntansi Keuangan Daerah", (Jakarta: Salemba Empat. 2008), Hlm 98

¹⁷Dedi Suharyadi dkk et al. 2018. "Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Bogor". Jurnal Moneter, Vol 5, No. 2

¹⁸Gilas Audi, "10 BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur", (<https://jatimnet.com/10-bumd-pemerintah-provinsi-jawa-timur>), pada 21 Desember 2021

giro, penerimaan atas imbalan jasa, pendapatan yang disebabkan oleh tuntutan pengganti kerugian daerah, pendapatan komisi, potongan atau jenis-jenis lainnya akan penjualan, pengadaan barang dan jasa bagi daerah, dan lain-lain sebagainya.¹⁹ Pada UU Nomor 33 Tahun 2004 berisi tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang berfungsi untuk membiayai sebuah pendapatan wilayah yang tidak tergolong kedalam sektor pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hafandi dan Romandhon (2020) mengenai pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap PAD Kabupaten Wonosobo menjelaskan bahwa pada tahun 2013 hingga 2017 pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD.²¹

Provinsi Jawa Timur merupakan pusat perekonomian yang terdiri dari 38 kabupaten atau kota secara tidak langsung Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah

¹⁹Abdul Halim, loc. it

²⁰Abdul Halim, "Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai. 2004)

²¹Yusuf Hafandi & Romandhon. 2020. "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap PAD Kabupaten Wonosobo". *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, Vol 3, No. 2

yang pada PAD. Kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bisa meningkatkan PAD yang ada pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Sehingga menjadi daerah yang mempunyai kemandirian tidak menggantungkan dana yang bersumber dari pemerintah pusat.²² Kemandirian ini artinya mandiri dalam merencanakan apapun atau mengelola sumber keuangan daerah yang dimiliki oleh setiap daerah masing-masing. Kemandirian tersebut jika mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka akan mengakibatkan ketahanan ekonomi daerah tersebut menjadi kuat pada saat menghadapi permasalahan sebuah perekonomian yang sifatnya nasional maupun internasional. Sebuah permasalahan tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap banyak atau sedikitnya sebuah pendapatan akan bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat yang berupa pemerintahan yang terdiri dari efisiensi akan biaya yang keluar oleh pemerintah, perdagangan pasar yang lemah, pembangunan, dan perkembangan ekonomi pada suatu daerah.²³ Lantas, adanya sifat kemandirian tersebut ialah sebuah tujuan yang diharapkan bagi Provinsi Jawa Timur suatu saat nanti supaya tidak menggantungkan anggaran yang didapatkan melalui pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadly Nggilu (2016) mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian

²²Kuswoyodkk et al. 2015. "Perkembangan Keuangan Daerah di Jawa Timur pada Masa Desentralisasi Fiskal".Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 3, No. 12

²³Rahardjo Adisasmita, "Pembiayaan Pembangunan Daerah"(Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011) Hlm 8

keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa pada tahun 2009 hingga 2014 pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan.²⁴ Dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dapat berkontribusi cukup besar terhadap kemandirian keuangan daerah yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Diah Rahmayani (2021) mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap kemandirian keuangan daerah Provinsi Banten Tahun 2015 hingga 2018 menjelaskan bahwa secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Provinsi Banten.²⁵

Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur diharapkan bisa membiayai pembangunan ekonominya supaya menjadi provinsi yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Jika PAD Provinsi Jawa Timur setiap waktu terjadi peningkatan terus menerus yang didapatkan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara tidak langsung provinsi tersebut mampu dalam menutupi seluruh anggaran belanja daerah yang

²⁴Fadly Nggilu. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo". Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16, No. 4

²⁵Diah Rahmayani, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten 2015-2018" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021) 159

bisa tercapai, menjadi daerah yang mempunyai sifat kemandirian serta tidak menjadikan beban untuk pemerintahan pusat. Jika jumlah pendapatan PAD yang tinggi, maka otomatis bisa berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun alasan penelitian ini menarik untuk dilakukan dikarenakan adanya perkembangan PAD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 hingga 2020 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.²⁶ Jika sebuah PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya maka komponen yang ada didalamnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga ikut mengalami peningkatan. Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur jika dibandingkan provinsi lainnya mempunyai PAD yang cukup banyak dalam realisasi penerimaan pada setiap tahunnya. Selain itu adanya riset gap yaitu terdapatnya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang membahas bagaimana pengaruh yang ada pada sumber-sumber PAD terhadap PAD. Pada penelitian tersebut menghasilkan adanya pengaruh dan tidak pengaruh terhadap PAD di berbagai daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD serta menganalisis komponen pada PAD yang paling berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020. Berdasarkan

²⁶BPS Jawa Timur, "Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Pendapatan di Provinsi Jawa Timur, 2016-2020", (<https://jatim.bps.go.id>), pada 12 Februari 2022

uraian di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020?
3. Apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020?
4. Apakah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020?
5. Variabel apa saja yang paling berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka peneliti memiliki tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.
2. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.
3. Menganalisis pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.
4. Menganalisis pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.
5. Menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari adanya penelitian ini dengan harapan bisa untuk bermanfaat bagi peneliti sendiri, orang lain, serta bisa dimanfaatkan untuk sumber referensi atau bisa digunakan untuk perbandingan penelitian satu dengan lainnya. Penelitian ini memiliki manfaat antara lain yaitu:

1. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini semoga bisa menghasilkan informasi tentang bagaimana kondisi keuangan daerah berupa PAD yang berasal melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Diharapkan pemerintah mampu menggali lebih banyak untuk penerimaan di suatu daerah dengan membuat regulasi yang sesuai dan tepat dengan kondisi daerah tersebut.

2. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini semoga bisa memenuhi sumber yang dapat digunakan untuk kajian atau penelitian tentang keuangan daerah pada sektor PAD serta bisa digunakan untuk sumber referensi bagi para peneliti suatu saat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah ialah sebuah wewenang yang berasal dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah baik lingkup wilayah kota maupun kabupaten. Hal tersebut bertujuan agar suatu daerah mampu dalam mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan kepentingannya sendiri dengan menyesuaikan kondisi pada daerah tersebut. Otonomi daerah berpacu pada UU yang berlaku dan mengikat.²⁷

Meskipun otonomi daerah sudah terlaksana, akan tetapi pada kenyataannya pemerintah pusat tidak langsung lepas tangan secara penuh kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap mengirimkan anggaran berupa dana perimbangan yang ditujukan untuk pemerintah daerah. Dana tersebut berfungsi sebagai anggaran pembangunan daerah dan menjadi bagian pendapatan daerah yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁸

Tujuan adanya otonomi daerah ialah menciptakan suatu daerah yang memiliki masyarakat dengan kesejahteraan tinggi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas pelayanan publik

²⁷Yoyo Sudaryo dkk et al. "Keuangan di Era Otonomi Daerah" (Yogyakarta: ANDI, 2017) Hlm. 86

²⁸Ibid., Hlm 87

yang ditujukan kepada masyarakat serta melakukan pemberdayaan masyarakat untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.²⁹

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang didapatkan oleh suatu wilayah yang berasal dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah dari wilayah tersebut dengan cara penarikan yang berpacu pada UU yang berlaku. Pendapatan asli daerah ialah suatu cerminan dan tolak ukur akan seberapa banyaknya perkembangan atau peningkatan ekonomi pada daerah tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan bagian penting dalam APBD.³⁰ Sebuah PAD ditujukan kepada masyarakat daerah tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai jenis kegiatan atau program yang ada pada daerah nantinya akan menggunakan dana yang bersumber dari PAD.

Misalnya pada saat sebuah daerah mengalami permasalahan mengenai adanya peningkatan angka pengangguran. Dengan adanya PAD pada daerah tersebut bisa dimanfaatkan untuk membentuk sebuah program pelatihan kerja. Pada saat pelatihan program pelatihan kerja tersebut sudah terlaksana, peserta pelatihan kerja akan mendapatkan biaya intensif yang bisa digunakan untuk membuka usaha melalui hasil dari pelatihan kerja yang sudah didapatkan.

²⁹Ibid., Hlm 88

³⁰Ahmad Yani Op. Cit Hlm 52

Seiring dengan dengan pemberian biaya intensif tersebut, dinas tenaga kerja daerah setempat tetap melakukan pendampingan dengan cara melakukan kegiatan *follow up* dan bimbingan setiap bulan dengan peserta pelatihan kerja. Adanya hal tersebut diharapkan angka pengangguran pada daerah tersebut berkurang. Maka, dengan adanya PAD dapat dimanfaatkan untuk mengatasi sebuah permasalahan pada suatu daerah.

3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

Pajak ialah sumber pendapatan yang diberikan untuk sebuah negara. Penerimaan yang diperoleh sebagian besar bersumber dari adanya penarikan pajak. Pajak merupakan sebuah kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa untuk negara oleh orang pribadi atau badan dengan berpacu kepada UU. Karakteristik pajak ialah di mana masyarakat tidak bisa secara langsung memperoleh sebuah imbalan atas pajak dan berfungsi untuk memenuhi keperluan negara guna mencapai sebuah kemakmuran bagi masyarakat.³¹ Maka, dapat disimpulkan setiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Pajak dibebankan dalam banyak hal seperti restoran, hiburan, air tanah, dan lain-lain sebagainya. Pendapatan melalui sektor pajak yang sudah dibayarkan oleh setiap orang pribadi atau

³¹Timbul Hamogan Simanjuntak dan Mukhlis Imam, "Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi"(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012) Hlm 13

badan tersebut akan dimanfaatkan dalam keperluan negara. Misalnya pembangunan bersifat non fisik contohnya pada kelompok masyarakat seperti orang yang sudah lanjut usia, anak dengan status yatim piatu, dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain, penerimaan pajak daerah juga berfungsi untuk pembiayaan pada sektor kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik untuk masyarakat daerah setempat. Lantas, untuk menjadi negara yang mempunyai perubahan dalam pembangunan ekonomi diharapkan seluruh masyarakat Negara Indonesia mampu berkerja sama untuk menjadi negara yang lebih baik lagi.

Pajak daerah ialah salah satu bagian dari komponen PAD yang mempunyai peran penting untuk sebuah keuangan daerah dalam peningkatan setiap tahunnya. Sebuah kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah dan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi menggunakan anggaran yang didapatkan melalui pajak daerah.³² Sebuah daerah dapat menyesuaikan berapa besarnya penarikan pajak pada daerah tersebut dengan menyesuaikan kondisi daerah tersebut. Dikarenakan, setiap daerah atau wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda serta melihat bagaimana kondisi ekonomi daerah tersebut.

³²Idem

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah ialah sebuah penarikan oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pembayaran akan jasa atau pelayanan atas pemberian izin tertentu yang sifatnya khusus untuk diberikan kepada pemerintah daerah guna kepentingan pribadi maupun badan.³³ Retribusi daerah merupakan peran penting dalam sebuah pendapatan daerah, retribusi ditetapkan sebagai pendapatan daerah dikarenakan terdapatnya kegiatan yang dilakukan oleh pribadi atau badan yang wajib memiliki perizinan.³⁴ Macam-macam retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ialah sebuah penarikan pada suatu daerah atau wilayah berupa transaksi atas pelayanan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk sebuah rencana keperluan agar masyarakat umum atau pemerintah bisa menikmati sebuah pelayanan yang sudah diberikan. Macam-macam retribusi ini ialah retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan atau kebersihan, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte catatan sipil, dan lain-lain sebagainya.³⁵

³³Jeni Susyanti dan Dahlan Ahmad, "Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi"(Malang: Empatdua Media. 2016) Hlm 266

³⁴Idem

³⁵Moh. Khusaini, "Keuangan Daerah ",(Malang: UB Press, 2018), Hlm 149-150

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ialah sebuah penarikan pada suatu daerah atau wilayah berupa transaksi atas jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah dan berpacu pada peraturan yang bersifat dagang. Retribusi daerah pada dasarnya di sisi lain juga disediakan oleh sektor bidang swasta. Macam-macam jenis ini ialah retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, tempat pelelangan, dan lain-lain sebagainya.³⁶

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ialah sebuah penarikan pada suatu daerah atau wilayah berupa transaksi atas kegiatan yang sifatnya tertentu oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan untuk memberikan persetujuan kepada perseorangan atau instansi untuk membina, mengatur, mengendalikan, serta mengawasi sebuah kegiatan, memanfaatkan tempat, menggunakan sumber daya alam, benda, alat atau pelayanan kategoris yang bertujuan sebagai melayani sebuah keperluan yang bersifat umum, melindungi, serta melestarikan sebuah wilayah. Macam-macam aneka ini adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tempat

³⁶Ibid., Hlm 151-152

penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan lain-lain sebagainya.³⁷

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sebuah hasil dari kekayaan yang dikelola oleh daerah yang bersifat dipisahkan. Sebuah daerah menerima pendapatan yang berasal dari perusahaan-perusahaan daerah yang sudah dibangun oleh wilayah tersebut. Pembangunan tersebut menggunakan dana yang berasal dari negara, secara sebagian atau keseluruhan dan perusahaan daerah yang terdapat pada wilayah tersebut. Pada akhirnya, hasil penerimaan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan tersebut menjadi sebuah PAD. Pada UU Nomor 33 Tahun 2004 yang membahas tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari beberapa objek, antara lain sebagai berikut:

1. Bagian keuntungan atau laba akan penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
2. Bagian keuntungan atau laba akan penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
3. Bagian keuntungan atau laba akan penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat.

³⁷Ibid., Hlm 153-154

Perusahaan daerah ialah sebuah badan usaha yang dibentuk oleh daerah yang berfungsi untuk mengembangkan kegiatan perekonomian dan berkontribusi guna pendapatan daerah tersebut. Dalam membentuk sebuah perusahaan daerah, pemerintah daerah wajib berpacu pada asas-asas sebuah ekonomi yang sehat atau berdaya serta berhasil. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1962 mengenai perusahaan daerah adalah ialah berikut:

1. Perusahaan ialah sebuah kesatuan produksi yang mempunyai sifat memberikan pelayanan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan menghasilkan sebuah pendapatan.
2. Tujuan perusahaan daerah ialah berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk masyarakat dan mengutamakan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja pada perusahaan yang memiliki tujuan adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak pada sebuah lapangan dengan menyesuaikan urusan rumah tangganya yang sesuai dengan peraturan perundangan dengan mengatur pokok-pokok pemda.
4. Cabang-cabang penting dan menguasai hajat hidup manusia yang banyak pada daerah tersebut yang diusahakan oleh

perusahaan daerah dengan menggunakan modal berupa kekayaan daerah yang dipisahkan.³⁸

Adanya perusahaan-perusahaan milik daerah yang ada, menjadikan perusahaan milik daerah sebagai objek dalam penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan tersebut secara tidak langsung berkontribusi pada PAD dan menjadi sumber penting dalam penerimaan suatu daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Karakteristik dari lain-lain daerah yang sah ialah pada satu pihak merupakan sebuah pelayanan untuk warga dengan tidak terlalu memperhitungkan bagaimana hasil laba yang didapatkan, akan tetapi hanya menutupi resiko biaya administrasi yang dikeluarkan. Di sisi lain, dapat digunakan sebagai langkah pemerintah daerah yang bertujuan untuk menerima pendapatan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah salah satu sumber komponen PAD dengan persyaratan tidak bertolak belakang dengan peraturan UU yang berlaku.

Sumber pendapatan dari sektor ini bisa diperoleh melalui pendapatan dinas-dinas yang ada pada suatu daerah. Dinas yang dibentuk oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan atau fasilitas untuk masyarakat. Di sisi lain, dinas-dinas

³⁸Fadillah Amin, "Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Prespektif Teoritis, Normatif, dan Empiris", (Malang: UB Press, 2019) Hlm 51

yang ada pada pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dan bertindak sebagai bagian dari perekonomian pemerintah daerah yang bertujuan guna memberikan pelayanan atau fasilitas untuk warga dengan persyaratan masyarakat wajib memberikan imbalan yang sesuai dengan pelayanan atau fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah. Melalui imbalan yang diberikan oleh warga untuk dinas-dinas yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah maka dana tersebut bisa menjadi salah satu komponen yang besar bagi PAD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menjelaskan tentang bagaimana lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang sudah difasilitasi bertujuan untuk menganggarkan bagi sebuah pendapatan daerah yang tidak termasuk dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ialah sebagai berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan bersifat tunai atau diangsur
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

5. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain dari perdagangan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah
6. Pendapatan laba yang berasal dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Penerimaan denda yang disebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Penerimaan denda pajak
9. Penerimaan denda retribusi
10. Penerimaan total dari eksekusi atas jaminan
11. Penerimaan dari pengembalian
12. Pelayanan sosial dan umum
13. Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)³⁹

4. Hubungan Antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rochmat Soemitro & Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak ialah iuran yang berasal dari rakyat yang nantinya akan menjadi kas negara yang mempunyai sifat mengikat dan memaksa dengan imbalan bersifat tidak langsung yang digunakan untuk masyarakat dan keperluan umum.⁴⁰ Pajak yang didapatkan pada suatu daerah akan menjadi bagian dari PAD yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan

³⁹Ibid., Hlm 52-53

⁴⁰Dwi Sunar Prasetyono, "Buku Pintar Pajak", (Jogjakarta: Laksana, 2012) Hlm 12

daerah tersebut. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Marita & Ketut Alit Suardana (2016) mengenai pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Denpasar menjelaskan bahwa hasil pendapatan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan penerangan jalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2009 hingga 2013.⁴¹

5. Hubungan Antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Munawir (1997) menyebutkan bahwa retribusi ialah iuran untuk pemerintah yang bisa dipaksakan dan jasa balik secara langsung yang bisa ditunjuk. Paksaan dalam hal ini merupakan sebuah sifat ekonomis dikarenakan orang atau badan yang tidak merasakan jasa balik yang diperoleh dari pemerintah maka tidak akan dikenakan penarikan retribusi tersebut.⁴² Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak semuanya dibebankan kepada seluruh masyarakat akan tetapi hanya untuk orang tertentu. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dan kawan-kawan (2020) mengenai analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD se kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 hingga 2018 menjelaskan bahwa pajak daerah,

⁴¹Ni Made Marita & Ketut Alit Suardana. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar".E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 14, No. 1

⁴²Damas Dwi Anggoro "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" (Malang: UB Press, 2017) Hlm. 239

retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD.⁴³

6. Hubungan Antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Halim (2008) menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁴⁴ Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dedi Suharyadi dan kawan-kawan (2018) mengenai pengaruh retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa secara parsial dan simultan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bogor tahun 2011 hingga 2016.⁴⁵

7. Hubungan Antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dhyni Inka Syafitri (2016) pada penelitiannya yang berjudul “Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD (Studi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)”. Hasil dari penelitian

⁴³Hasibuan dkk et al., “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020) 58

⁴⁴Yusuf Hafandi & Romandhon Op. Cit. Hlm 183

⁴⁵Dedi Suharyadi dkk et al. Op. Cit Hlm 130

tersebut menjelaskan bahwa sektor lain-lain pendapatan asli daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan PAD yang disebabkan terdapatnya realisasi yang cukup besar.⁴⁶ Komponen yang ada pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempunyai banyak sektor pendapatan yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kendy Rama Nuzulistyan dan kawan-kawan (2017) mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 hingga 2015.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menggunakan referensi penelitian terdahulu. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

⁴⁶Dhiny Inka Syafitri, "Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016) 11

⁴⁷Kendy Rama Nuzulistyan dkk et al. 2017. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah". *Journal Of Accounting*, Vol 3, No. 3

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Puja Rizqy Ramadhan (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Metode sensus dengan waktu periode pada tahun 2016 hingga 2018 serta uji statistik linier berganda	Terdapatnya pajak daerah dan retribusi daerah yang berpengaruh secara simultan terhadap PAD kabupaten/kota di Sumatera Utara	Menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel X, variabel PAD sebagai variabel Y, dan kabupaten/kota sebagai sampel penelitian	Tidak menggunakan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X, menggunakan uji statistik analisis linier berganda, Provinsi Sumatera Utara sebagai tempat penelitian, dan tidak menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap PAD
2	Meilda Ellysa Putri & Sri Rahayu (2015)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)	Analisis regresi linier berganda	Secara simultan dan parsial pajak daerah serta retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD	Menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel X serta variabel PAD sebagai variabel Y	Tidak menggunakan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X, menggunakan analisis regresi linier berganda, Kabupaten Cirebon sebagai tempat penelitian, dan tidak menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap PAD
3	Beta Asteria (2015)	Analisis Pengaruh	Metode sensus	Secara parsial dan secara	Menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah	Tidak menggunakan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

		Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	dengan sampel sebanyak 165 33 kabupaten atau kota pada Jawa Tengah dengan waktu periode pada tahun 2008 hingga 2012 dan regresi berganda	simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD	sebagai variabel X, variabel PAD sebagai variabel Y, dan kabupaten/kota sebagai sampel penelitian	pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X, menggunakan regresi berganda, Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat penelitian, serta tidak menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap PAD
4	I Sudarmana Putu Agus, Gede Mertha Sudiarta (2020)	Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah	Metode sampel jenuh untuk menentukan sampel dan analisis regresi linier berganda	Terdapatnya pengaruh signifikan oleh retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan ataupun parsial terhadap PAD di Kabupaten Badung Tahun 2008-2018	Menggunakan variabel retribusi daerah dan pajak daerah sebagai variabel X dan variabel PAD sebagai variabel Y	Tidak menggunakan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X, menggunakan regresi berganda, Kabupaten Badung sebagai tempat penelitian, serta tidak menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap PAD
5	Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, Eulin Karlina (2020)	Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Analisis regresi linier berganda dibantu dengan alat IMB SPSS <i>Statistics</i> 21	Secara parsial dan simultan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Menggunakan variabel retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai variabel X serta variabel PAD sebagai variabel Y	Tidak menggunakan variabel pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X, menggunakan regresi berganda, Kabupaten Bogor sebagai tempat penelitian, serta tidak menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap PAD

		Dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Bogor		tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bogor tahun 2011 hingga 2016		
6	Yusuf Hafandi, Romandhon Romandhon (2020)	Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo	Pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder dan uji regresi linier berganda	Pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD akan tetapi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD tahun 2013 hingga 2017	Menggunakan variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X serta variabel PAD sebagai variabel Y	Menggunakan analisis data sekunder dan uji regresi linier berganda, Kabupaten Wonosobo sebagai tempat penelitian, dan tidak menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap PAD
7	Iis Dahlia (2017)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Data sekunder dengan analisis regresi data tahun 2012 hingga 2016	Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah terhadap PAD dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara	Menggunakan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai variabel X serta variabel PAD sebagai variabel Y	Tidak menggunakan variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X, menggunakan regresi berganda, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai tempat penelitian, serta tidak menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap PAD

		Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir		retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD		
8	Adi Nugroho (2009)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012	Teknik sampling berupa sensus sampling dengan total sampel sebanyak 35 kabupaten atau kota dan metode uji asumsi klasik, analisis regresi berganda serta uji hipotesis	Penambahan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan PAD	Menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel X, variabel PAD sebagai variabel Y, menggunakan asumsi klasik dan uji hipotesis, serta kabupaten/kota sebagai sampel penelitian	Tidak menggunakan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X, menggunakan analisis regresi berganda, Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat penelitian, serta tidak menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap PAD
9	Kendy Rama Nuzulistyan dkk (2017)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli	Analisis regresi linier berganda	Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli	Menggunakan variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X serta variabel PAD sebagai variabel Y	Menggunakan analisis regresi linier berganda, Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat penelitian, dan tidak menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap PAD

		Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah		daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD akan tetapi secara parsial pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD tahun 2008 hingga 2015		
--	--	--	--	--	--	--

10	Ardiyanto, Evada Dewata, Yuliana Sari & Susi Ardiani, Karina Leonasari (2018)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis	Secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap PAD akan tetapi retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD tahun 2001 hingga 2015	Menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel X, variabel PAD sebagai variabel Y, serta uji asumsi klasik dan uji hipotesis untuk analisis data	Tidak menggunakan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X, menggunakan analisis regresi berganda, Provinsi Sumatera Selatan sebagai tempat penelitian, serta tidak menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap PAD
----	---	--	---	--	---	--

Berdasarkan tabel di atas mengenai beberapa macam penelitian terdahulu, maka terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang membahas bagaimana pengaruh yang ada pada sumber-sumber PAD terhadap PAD. Penelitian tersebut menghasilkan adanya pengaruh dan tidak pengaruh terhadap PAD di berbagai daerah. Lantas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

C. Kerangka Konseptual

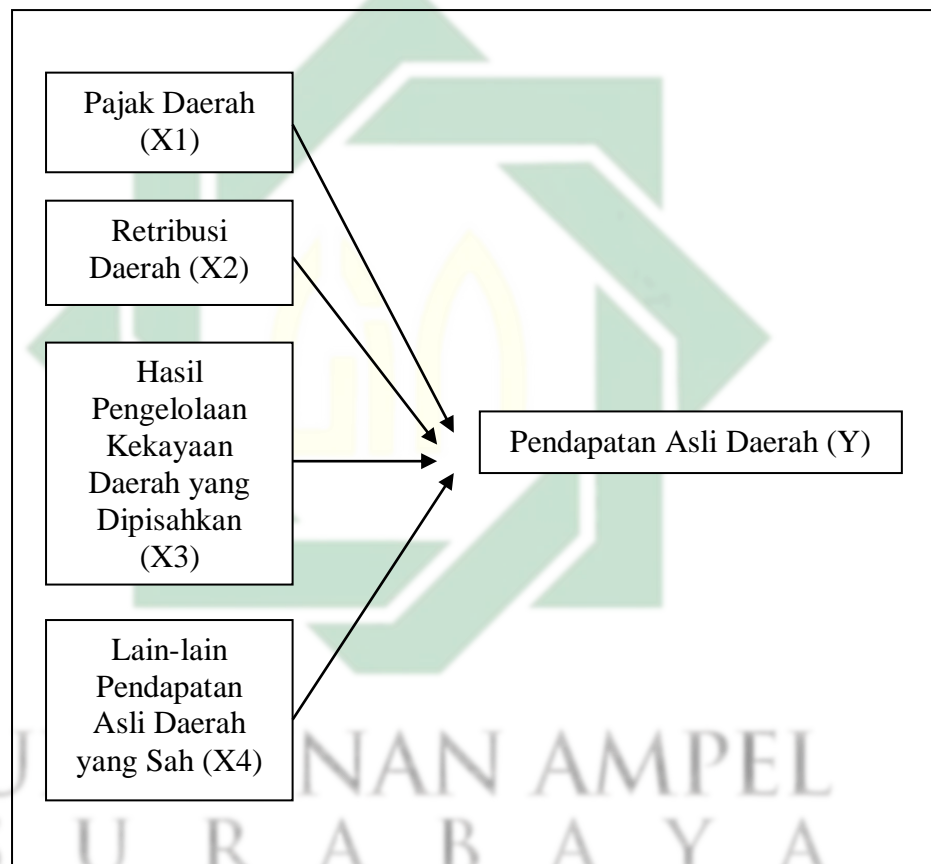
Pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan guna mengelola dan menggunakan sumber pendapatan daerah yang dimiliki sejalan dengan apresiasi masyarakat daerah tersebut. Pemerintah daerah wajib memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah supaya tidak terjadi kekurangan pada sebuah pendapatan negara (Mardiasmo, 2004:26).⁴⁸

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang didapatkan bagi daerah berdasarkan peraturan daerah dengan tetap berpacu pada UU. PAD berfungsi sebagai memberikan hak untuk pemerintah daerah guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah guna sebagai wujud dari desentralisasi.⁴⁹

⁴⁸Arenawati “Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi 2” (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2016) Hlm. 119

⁴⁹DJPK Kemenkeu, (<https://djpk.kemenkeu.go.id>) pada 28 Januari 2022

Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan untuk daerah mempunyai beberapa komponen penerimaan didalamnya. Komponen tersebut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen tersebut dapat dipahami pada gambar 2.1.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 2.1 PAD atau variabel Y memiliki berbagai sumber-sumber penerimaan yang bersumber dari 4 sektor atau variabel X sebanyak 4. Variabel X terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mempunyai pengaruh terhadap PAD.

Pajak daerah merupakan pendapatan bagi suatu daerah yang sifatnya wajib dan memaksa untuk perorangan maupun badan. Pajak daerah terbagi menjadi beberapa jenis seperti pajak hotel dengan penarikan sebesar 10%, pajak restoran sebesar 10%, pajak hiburan sebesar 35%, pajak reklame sebesar 25%, pajak penerangan jalan sebesar 10%, pajak parkir sebesar 20%,⁵⁰ pajak air tanah sebesar 20%,⁵¹ pajak PBB sebesar 0,5%,⁵² dan pajak BPHTB sebesar 5%.⁵³

Retribusi daerah merupakan pendapatan bagi suatu daerah berupa penarikan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk sebuah perizinan. Retribusi daerah terbagi menjadi beberapa jenis seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan bagi suatu daerah yang bersumber dari perusahaan-perusahaan yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah pada wilayah tersebut. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbagi menjadi beberapa jenis seperti perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, dan perusahaan milik kelompok masyarakat atau swasta.

⁵⁰Arenawati Op. Cit

⁵¹Hamida Amri Safarina, "Pengambilan Air Tanah Juga Kena Pajak, Sudah Tahu? Begini Aturannya", (<https://news.ddtc.co.id>), pada 31 Januari 2022

⁵²Maulana Ramadhan, "Catat, Ini Cara Menghitung Besaran PBB", (<https://www.kompas.com>), pada 13 Juni 2022

⁵³Ardiansyah Fadli, "Bagaimana Cara Menghitung BPHTB Saat Beli Rumah? Simak di Sini", (<https://www.kompas.com>), pada 13 Juni 2022

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan bagi suatu daerah yang berasal dari dinas-dinas yang ada pada daerah tersebut. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terbagi menjadi beberapa jenis seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain sebagainya. Maka dengan adanya PAD yang dimiliki bagi suatu daerah diharapkan dapat terciptanya suatu daerah yang mampu mengelola keuangan daerah tersebut secara mandiri tidak menggantungkan kepada pemerintah pusat dan menciptakan masyarakat daerah yang memiliki kesejahteraan tinggi.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pajak daerah diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

H2 : Retribusi daerah diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

H3 : Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

H4 : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020” ini merupakan metode penelitian bersifat kuantitatif. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dikarenakan mempunyai tujuan untuk mengetahui karakteristik dan objek dengan bentuk-bentuk matematis, teori, serta hipotesis yang mempunyai hubungan dengan fenomena PAD.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah tahun 2016 hingga 2020. Data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, dan Portal Data DJPK Kementerian Keuangan. Di sisi lain, penelitian ini peneliti menggunakan sumber referensi dalam membantu penelitian melalui jurnal serta informasi yang tertulis pada *website* yang sifatnya resmi dan milik pemerintah.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi ialah sebuah keseluruhan yang berisi tentang objek ataupun subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik bersifat

husus atas pilihan peneliti yang selanjutnya bertujuan untuk dipelajari dan menarik sebuah kesimpulan.⁵⁴ Pada penelitian ini menggunakan data bersifat sekunder yang berisi tentang PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

2. Sampel

Sampel ialah suatu bagian dari jumlah ataupun karakteristik dari sebuah populasi.⁵⁵ Sampel pada penelitian ini diperoleh melalui 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ialah sebuah sifat atau nilai yang bersumber dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki jenis-jenis tertentu atas pilihan peneliti yang selanjutnya bertujuan untuk dipelajari dan menarik sebuah kesimpulan.⁵⁶ Pada penelitian ini terdapat adanya variabel *independen* dan *dependen*. Variabel *independen* ialah variabel yang bersifat bebas atau mempengaruhi, variabel ini dilambangkan dengan (X). Sedangkan variabel *dependen* ialah variabel yang bersifat terikat atau dipengaruhi, variabel ini dilambangkan dengan (Y). Penelitian ini menggunakan variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

⁵⁴Sugiyono "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: ALFABETA, 2016). Hlm 80

⁵⁵Ibid., Hlm 81

⁵⁶Ibid., Hlm 38

1. Variabel *Independen* (X1) : Pajak daerah
2. Variabel *Independen* (X2) : Retribusi daerah
3. Variabel *Independen* (X3) : Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Variabel *Independen* (X4) : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
5. Variabel *Dependen* (Y) : Pendapatan asli daerah

E. Definisi Operasional

Untuk memahami unsur sebuah penelitian dan memberitahukan bagaimana cara mengukur sebuah variabel, lantas peneliti memerlukan adanya definisi operasional. Pada penelitian ini terdapat definisi operasional yang terdiri dari beberapa macam-macam variabel untuk digunakan pada penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan asli daerah ialah sumber pembiayaan untuk pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁵⁷ Pada penelitian ini menggunakan data PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

⁵⁷Muhammad Fauzan "Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah", (Yogyakarta: UII Press, 2006). Hlm 235

2. Variabel Pajak Daerah (X1)

Pajak daerah ialah kontribusi yang sifatnya wajib oleh orang pribadi atau badan untuk suatu daerah tanpa adanya imbalan yang sama dan bersifat terpaksa sesuai dengan peraturan UU yang berlaku guna menyelenggarakan kegiatan pemerintahan serta pembagunan bagi suatu daerah.⁵⁸ Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, air tanah, dan lain-lain sebagainya. Pada penelitian ini menggunakan data pajak daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

3. Variabel Retribusi Daerah (X2)

Retribusi daerah ialah penarikan daerah sebagai pembayaran akan jasa atau pemberian atas izin tertentu yang bersifat khusus yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah suatu daerah guna kepentingan bagi orang pribadi atau badan.⁵⁹ Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan data retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

⁵⁸Sugianto "Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)", (Jakarta: Grasindo, 2008). Hlm 2

⁵⁹Loc. cit.

4. Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sebuah pendapatan yang didapatkan melalui pengelolaan kekayaan daerah yang sifatnya terpisah dari pengelolaan APBD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas pernyataan modal perusahaan BUMD, BUMN, dan swasta atau kelompok usaha milik masyarakat.⁶⁰ Pada penelitian ini menggunakan data hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

5. Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah pendapatan daerah yang tidak termasuk pada jenis pajak daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁶¹ Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan lain-lain sebagainya. Pada penelitian ini menggunakan data lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

⁶⁰Ahmad Yani Op. Cit Hlm 73

⁶¹Portal APBD Kota Bandung, "Data APBD Kota Bandung", (<http://data.bandung.go.id>), pada 8 Februari 2022

F. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data panel mempunyai kelebihan tersendiri dalam sebuah penelitian. Kelebihan data panel ialah sebagai berikut:⁶²

- a. Mampu mengontrol individu yang sifatnya heterogen seperti antar wilayah, perusahaan, serta sangat bervariasi.
- b. Kombinasi antara data *time series* dan *cross section* yang mengakibatkan data menjadi lebih informatif.

Data *time series* ialah data yang bersumber dari sebuah objek yang berupa runtut waktu.⁶³ Data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2016 hingga 2020. Sedangkan data *cross section* ialah data yang bersumber dari beberapa objek tertentu pada waktu tertentu.⁶⁴ Data *cross section* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. seperti mampu mengontrol data seperti antar wilayah secara individu, lebih informar. Maka data yang digunakan untuk penelitian ini ialah selama 5 tahun serta jumlah data sebanyak 190 data dengan satuan miliar rupiah.

⁶² Nuryanto & Zlfikar Bagus Pambuko "Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi", (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018). Hlm 83

⁶³Ibid., Hlm 4

⁶⁴Ibid., Hlm 5

2. Sumber Data

Adanya sumber data yang tidak sama pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam mempublikasi data mengenai PAD beserta komponen yang ada didalamnya maka dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh bersumber dari BPS, BPKAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, serta Portal Data DJPK Kementerian Keuangan. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan merupakan data panel di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

G. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebuah penelitian wajib memperoleh data, lantas diperlukan sebuah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara melalui studi pustaka. Teknik studi pustaka ialah sebuah teknik dalam mendapatkan data dengan cara melalui mempelajari atau menganalisis dari buku-buku literatur atau data yang sudah diolah terlebih dahulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui *website* yang ada pada BPS, BPKAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, serta Portal Data DJPK Kementerian Keuangan.

H. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi data panel. Di mana, teknik

tersebut merupakan penggabungan data antara *cross section* dan *time series* yang berfungsi untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan pada variabel *independen* yang mempengaruhi PAD. Pada penelitian ini menggunakan gambaran persamaan model sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

Y	: Pendapatan asli daerah
β_0	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien regresi
X1	: Pajak daerah
X2	: Retribusi daerah
X3	: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
X4	: Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
ϵ	: <i>Error</i>

Persamaan model regresi di atas mempunyai makna antara lain sebagai berikut:

1. Nilai β_0

Nilai β_0 ialah sebuah nilai koefisien regresi variabel PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan variabel X sebesar 0 atau tidak terjadi adanya perubahan antara variabel X terhadap variabel Y.

2. Nilai β_{1X1}

Nilai β_{1X1} ialah sebuah nilai koefisien regresi variabel pajak daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi adanya perubahan antara pajak daerah terhadap PAD.

3. Nilai β_{2X2}

Nilai β_{2X2} ialah sebuah nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi adanya perubahan antara retribusi daerah terhadap PAD.

4. Nilai β_{3X3}

Nilai β_{3X3} ialah sebuah nilai koefisien regresi variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi adanya perubahan antara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD.

5. Nilai β_{4X4}

Nilai β_{4X4} ialah sebuah nilai koefisien regresi variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi adanya perubahan antara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD.

6. Nilai ϵ

Nilai ϵ ialah sebuah nilai koefisien regresi variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap PAD.

Pada sebuah penelitian regresi data panel mempunyai berbagai bentuk model penelitian, model tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Model *Common Effect*

Model *common effect* atau bisa disebut *pooled least square* ialah sebuah teknik pada regresi data panel di mana pada saat observasi model ini mempunyai regresi yang mengakibatkan data tersebut menjadi dimensi tunggal. Model ini berasumsi jika nilai intersep pada setiap variabel ialah sama begitu pun dengan slope koefisien. Cara ini mudah akan tetapi model dapat mendistorsi gambaran yang asli dari hubungan antara variabel *dependen* dan *independen* setiap unit *cross section* (Sukendar & Zainal, 2007).⁶⁵

2. Model *Fixed Effects*

Model ini merupakan estimasi pada data panel dengan memanfaatkan variabel dummy guna menemukan terdapatnya perbedaan intersep. Model ini biasanya disebut sebagai teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV). Model ini bisa ditulis dengan rumus sebagai berikut :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \beta_5 \ln X_{5it} + e_{it}$$

⁶⁵Alfira Mulya Astuti. 2010. "Fixed Effect Model pada Regresi Data Panel". Beta, Vol 3, No. 2

Keterangan :⁶⁶

Jika chi square lebih dari 0,05 maka H_0 diterima

Jika chi square kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak

3. Model *Random Effect*

Terdapatnya variabel berupa dummy pada model *fixed effect* berfungsi sebagai perwakilan atas ketidaktahuan peneliti mengenai model yang sebenarnya. Akan tetapi model ini mengakibatkan dampak pada derajat kebebasan berkurang hingga berakibat pada parameter yang berkurang. Permasalahan tersebut mampu diatasi dengan memanfaatkan variabel gangguan berupa model *random effect*. Model ini merupakan estimasi dari data panel di mana variabel gangguan akan bisa saling mempunyai hubungan berupa setiap waktu dan individu.⁶⁷

Sesuai dengan bentuk-bentuk model penelitian regresi data panel di atas, maka saat memilih model yang akan dipakai memerlukan seleksi terlebih dahulu memakai uji spesifikasi antara lain efek tetap (*fixed effect*) atau efek random (*random effect*).

1. Uji Spesifikasi Model

a. Uji Chow

Pada saat menentukan model yang sesuai dengan penelitian data panel peneliti bisa menggunakan uji spesifikasi. Uji

⁶⁶Ansolino dkk et al. "Buku Ajar Ekonometrika" (Yogyakarta: Deepublish, 2016) Hlm. 147

⁶⁷Ibid., Hlm 150

chow bertujuan untuk menentukan model yang tepat diantara model *fixed effect* atau *common effect*. Jika hasil dari uji spesifikasi lebih dari 0,05 pada probabilitas chi-square, lantas model yang baik untuk dilakukan penelitian ialah model *common effect*. Akan tetapi jika hasil dari uji spesifikasi kurang dari 0,05 pada probabilitas chi-square, lantas model yang baik untuk dilakukan penelitian ialah model *fixed effect*.

b. Uji Hausman

Pada uji hausman, pada saat menentukan model yang tepat dapat menggunakan *fixed effect model* atau *random effect model*. Pada objek *fixed effect model* mempunyai intersep yang sifatnya berbeda-beda akan tetapi setiap intersep tidak akan berubah dengan seiring jalannya waktu atau biasa disebut dengan *time-invariant*. Akan tetapi pada intersep *random effect model* secara keseluruhan ialah perwakilan dari nilai rata-rata tersebut.⁶⁸

Ho : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Pada saat penelitian menunjukkan bahwa hipotesis Ho ditolak maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut dianjurkan untuk menggunakan *fixed effect model*. Hal tersebut dikarenakan pada *random effect model* memungkinkan terjadinya terealisasi antara satu atau lebih pada variabel *independen*. Apabila

⁶⁸Damodar N. Gujarati dan dawn C, Porter, *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012), Hlm 273

penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H_0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut dianjurkan untuk menggunakan *random effect model*.

Kriteria lain untuk menentukan keputusan menggunakan model *fixed effect* atau *random effect* ialah dengan cara melihat nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model yang tepat untuk digunakan ialah model *fixed effect* dan sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka model yang tepat untuk digunakan ialah model *random effect*.⁶⁹

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memiliki beberapa persyaratan dalam melakukan uji analisis regresi linier berganda yang terdiri dari sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi sebagai menguji model regresi variabel pengganggu atau residual apakah mempunyai distribusi yang sifatnya normal dikarenakan pada uji t dan f diasumsikan nilai residual harus mengikuti distribusi yang sifatnya normal. Jika asumsi ini tidak diperhatikan maka pada uji normalitas akan tidak valid guna jumlah sampel yang kecil.⁷⁰ Langkah-langkah dalam mendeteksi residual yang merupakan distribusi normal atau tidaknya bisa dilakukan dengan cara menggunakan metode Jargue-

⁶⁹Jihad Lukis Panjawa & RR Retno Sugiharti "Pengantar Ekonometrika Dasar Teori dan Aplikasi Praktis Untuk Sosial-Ekonomi", (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2021). Hlm 169

⁷⁰Damodar N. Gujarati dan dawn C, Porter Op. Cit

Bera. *Jarque-Bera test* berpendapat bahwa jika hasil probabilitas lebih dari 0,05 lantas seluruh variabel tersebut mempunyai distribusi yang normal. Akan tetapi jika hasil probabilitas kurang dari 0,05 lantas seluruh variabel tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal.⁷¹

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berfungsi sebagai menguji model regresi apakah mempunyai korelasi antara variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat pada matriks korelasi yang ada pada variabel bebas. Apabila nilai koefisien korelasi lebih dari 0,80 lantas data tersebut terjadi multikolinieritas. Terdapatnya multikolinieritas bisa disebabkan karena nilai R² yang cukup tinggi dan nilai F statistik yang signifikan. (Gurajati, 2006)⁷²

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi sebagai menguji model regresi apakah mengalami ketidaksamaan *variance* yang berasal dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Sebuah model regresi bisa disebut baik jika tidak mengalami heteroskedastisitas. Langkah-langkah dalam mengetahui terjadi atau tidaknya sebuah heteroskedastisitas ialah dengan menggunakan metode Glejser. Pada metode Glejser pengujian

⁷¹Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter Op. Cit

⁷²Jihad Lukis Panjawa & RR Retno Sugiharti Op. Cit

heteroskedastisitas harus memperoleh nilai absolut residual terlebih dahulu guna melihat hasil resabs pada probabilitas setiap variabel.⁷³ Apabila nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05 maka data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05 maka data tersebut terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berfungsi sebagai menguji model regresi linier apakah mempunyai hubungan antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi, lantas bisa dikatakan terdapatnya autokorelasi. Metode analisis pengujian nilai Durbin Watson atau *DW test* berfungsi untuk menguji ada atau tidaknya sebuah autokorelasi.⁷⁴ Uji autokorelasi pada Durbin Watson mempunyai beberapa kriteria pada hasil pengujian tersebut. Kriteria uji autokorelasi tersebut ialah sebagai berikut:

a. Menentukan Autokorelasi Positif

Apabila nilai $d < d_L$ maka terjadi autokorelasi positif.

Apabila nilai $d > d_U$ maka tidak terjadi autokorelasi positif.

Apabila nilai $d_L < d < d_U$ maka hasil uji autokorelasi tidak meyakinkan atau tidak bisa disimpulkan.

⁷³Ansolino dkk et al. Op. Cit Hlm 44

⁷⁴Damodar N. Gujarati dan dawn C, Porter Op. Cit

b. Menentukan Autokorelasi Negatif

Apabila nilai $(4 - d) < \text{nilai } dL$ maka terjadi autokorelasi negatif.

Apabila nilai $(4 - d) > \text{nilai } dU$ maka tidak terjadi autokorelasi negatif.

Apabila nilai $dL < \text{nilai } (4 - d) < \text{nilai } dU$ maka hasil uji autokorelasi tidak meyakinkan atau tidak bisa disimpulkan.

3. Uji Simultan (F)

Dalam sebuah penelitian, uji simultan (F) berfungsi sebagai mengetahui apakah keseluruhan variabel bebas mempengaruhi secara bersama terhadap variabel terikat. Pada uji F ini mempunyai tingkat signifikansi sebanyak 0,05. Langkah-langkah dalam uji F antara lain sebagai berikut⁷⁵:

a. Menentukan hipotesis

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$$

Maka, variabel X1, X2, X3, dan X4 tidak mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel Y

$$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$$

Maka, variabel X1, X2, X3, dan X4 mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel Y

b. Membuat dasar pengambilan keputusan uji F

Pada pengujian hipotesis dapat memakai F statistik dengan cara pada saat mengambil keputusan harus memenuhi kriteria seperti

⁷⁵Damodar N. Gujarati dan dawn C, Porter Op. Cit

membandingkan nilai F statistik dengan besarnya kepercayaan sebanyak 95% atau membandingkan antara nilai F hasil dengan nilai F tabel. Dalam mencari F hitung dapat menggunakan rumus seperti:

$$F = \frac{R^2(k-2)}{1-R^2(n-k+1)}$$

Keterangan :

F : F hitung

R^2 : Koefisien determinan

n : Jumlah observasi

k : Jumlah variabel dengan $df = (k-1 : n-k)$

Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Variabel *independen* (X_1, X_2, X_3, X_4) secara bersamaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Y).

Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel dengan signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Variabel *independen* (X_1, X_2, X_3, X_4) secara bersamaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Y).

4. Uji Parsial (t)

Uji parsial (t) berfungsi sebagai memahami bagaimana seberapa jauh hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara individu. Pada uji parsial (t) tersebut memakai tingkat signifikansi sebesar

5% atau 0,05 dengan mempunyai tingkat keyakinan sebanyak 95%. Sebelum melakukan uji t maka terlebih dahulu membuat hipotesis antara lain sebagai berikut⁷⁶:

a. Menentukan hipotesis

Hipotesis 1

$H_0 : \beta_i \geq 0$

Dapat diduga bahwa variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$H_0 : \beta_i < 0$

Dapat diduga bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hipotesis 2

$H_0 : \beta_i \geq 0$

Dapat diduga bahwa variabel retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$H_0 : \beta_i < 0$

Dapat diduga bahwa variabel retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hipotesis 3

$H_0 : \beta_i \geq 0$

⁷⁶Damodar N. Gujarati dan dawn C, Porter Op. Cit

Dapat diduga bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$H_0 : \beta_i < 0$$

Dapat diduga bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hipotesis 4

$$H_0 : \beta_i \geq 0$$

Dapat diduga bahwa variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$H_0 : \beta_i < 0$$

Dapat diduga bahwa variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Menghitung nilai t hitung dari setiap koefisien regresi kemudian mencari nilai t tabel dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Keterangan

t : t hitung

β_i : Koefisien regresi

$Se(\beta_i)$: Standart error dari koefisien regresi

- c. Untuk mengambil hasil keputusan ditolak atau diterima H_0 bisa melakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel lantas H_0 akan diterima atau signifikan. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil daripada t tabel lantas H_0 ditolak atau tidak signifikan.

5. Uji Koefisien Determinan R^2

Koefisien determinan atau R^2 ialah sebuah ukuran yang singkat pada sebuah data guna memberitahukan untuk kita bagaimana garis regresi sampel yang baik. Koefisien determinan berfungsi sebagai mengukur bagaimana seberapa jauh sebuah kemampuan model guna menjelaskan tentang berbagai jenis variabel yang sifatnya terikat. Koefisien determinan mempunyai nilai sebesar antara nol dan satu. Semakin besar nilai dari koefisien determinan maka semakin besar juga bagaimana peran variabel pada saat menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinan mempunyai rumus sebagai berikut⁷⁷:

⁷⁷Damodar N. Gujarati dan dawn C, Porter Op. Cit

$$R^2 = \frac{(Y_1 - Y)^2}{(Y_2 - Y)^2}$$

Keterangan

R^2 : Koefisien determinan

Y : PAD

Sifat dari uji koefisien determinan R^2 ialah sebagai berikut:

- a. Nilai besarnya bersifat tidak pernah negatif atau selalu positif.
- b. Jumlah nilai R^2 mempunyai batasan senilai $0 \leq (R^2) \leq 1$.

Jika jumlah nilai R^2 sebesar 1 maka garis regresi tersebut telah sesuai dan bisa dipastikan bahwa variabel bebas mempunyai hubungan terhadap variabel terikat. Akan tetapi jika jumlah nilai R^2 sebesar 0 maka variabel bebas tersebut tidak mempunyai hubungan terhadap variabel terikat.

6. Uji Koefisien Beta atau Analisis Elastisitas

Uji koefisien beta atau analisis elastisitas berfungsi untuk memahami variabel X yang paling berpengaruh terhadap variabel Y. Koefisien regresi bisa dilakukan dengan cara mencari nilai beta.⁷⁸ Sehingga hasil dari uji koefisien beta tersebut dapat dilihat dengan cara mencari nilai absolut terbesar pada masing-masing variabel X guna mengetahui variabel X mana yang mempunyai pengaruh paling besar pada penelitian tersebut. Rumus dari uji koefisien beta ialah sebagai berikut:

⁷⁸Fajar Rahardian, "Efek Daya Tarik Promosi dan Komunitas terhadap Minat Pembelian Mobil Suzuki Ertiga di Jawa Timur" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018) 48

$$\varepsilon = \beta i \frac{\bar{X}i}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

ε : Nilai elastisitas sebuah variabel.

βi : Nilai koefisien regresi.

$\bar{X}i$: Rata-rata jumlah data untuk variabel bebas.

\bar{Y} : Rata-rata jumlah data untuk variabel terikat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Profil Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur ialah sebuah provinsi yang mempunyai daerah paling luas pada Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur memiliki luas sebesar 47.803,49 km² atau 18,457,03 sq mi. Dari sisi fisiografi Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa zona. Dataran rendah dan dataran tinggi pada bagian tengah seperti Kota Malang dan sekitarnya merupakan daerah yang mempunyai tanah cukup subur untuk sebuah lahan pertanian, daerah bagian utara seperti Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya merupakan daerah yang terkenal dengan daerah pegunungan yang relatif tandus serta daerah bagian selatan seperti Kabupaten Pacitan dan sekitarnya merupakan daerah perbukitan yang merupakan daerah pesisir pantai selatan. Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa pulau seperti Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, dan lain-lain sebagainya.



Gambar 4.1
Peta Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur memiliki panjang bentangan arah dari barat hingga timur sekitar 400 km, lebar bentangan dari arah utara hingga selatan sekitar 200 km akan tetapi untuk wilayah timur sendiri sedikit kecil sekitar 60 km. Provinsi Jawa Timur mempunyai batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Selat Bali (Provinsi Bali)
- c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- d. Sebelah Barat : Provinsi Jawa Tengah

2. Wilayah Administrasi dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur dari segi administrasi ialah sebuah wilayah yang mempunyai 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Banyaknya wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur maka Kota Surabaya merupakan sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten yang mempunyai luas paling kecil pada Provinsi Jawa Timur ialah Kabupaten Sidoarjo sebesar 634,38 km² akan tetapi kabupaten yang mempunyai luas paling besar pada Provinsi Jawa Timur ialah Kabupaten Banyuwangi sebesar 5.782,50 km². Sedangkan kota yang mempunyai luas paling kecil pada Provinsi Jawa Timur ialah Kota Mojokerto sebesar 20,21 km² akan tetapi kota yang

mempunyai luas paling besar pada Provinsi Jawa Timur ialah Kota Surabaya sebesar 350,54 km².⁷⁹

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mempunyai jumlah penduduk sebesar 40.665.696 jiwa pada 38 kabupaten/kota. Kabupaten yang mempunyai penduduk paling sedikit pada Provinsi Jawa Timur ialah Kabupaten Pacitan sebesar 586.110 jiwa akan tetapi kabupaten yang mempunyai penduduk paling besar pada Provinsi Jawa Timur ialah Kabupaten Malang sebesar 2.654.448 jiwa. Sedangkan kota yang mempunyai penduduk paling kecil pada Provinsi Jawa Timur ialah Kota Mojokerto sebesar 132.434 jiwa akan tetapi kota yang mempunyai penduduk paling besar pada Provinsi Jawa Timur ialah Kota Surabaya sebesar 2.874.314 jiwa.⁸⁰

3. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain yang sah.⁸¹ Adanya PAD mencerminkan bagi suatu daerah dalam mengelola keuangannya sendiri menjadi daerah yang mandiri tidak menggantungkan dana kepada pemerintah pusat. Penerimaan PAD

⁷⁹Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota (km²), 2016-2020" (www.jatim.bps.go.id), pada 14 Juni 2022

⁸⁰Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Penduduk Provinsi (Jiwa), 2018-2020" (www.jatim.bps.go.id), pada 16 Maret 2022

⁸¹Hanif Nurcholis, "Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah" (Jakarta: Grasindo. 2007) Hlm. 182

Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016-2020 (Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2016	15.817.795.024.797,00
2017	17.324.177.664.424,20
2018	18.531.062.021.823,40
2019	19.327.125.485.405,90
2020	17.951.235.057.953,00

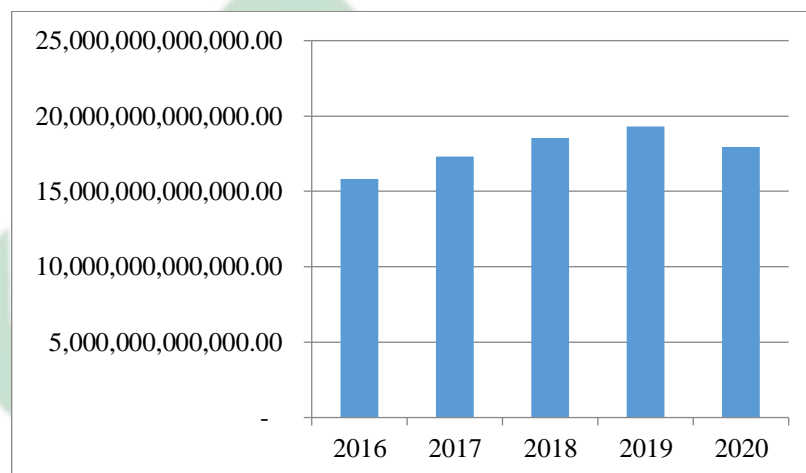
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2020

Berdasarkan tabel 4.1 menjelaskan bahwa PAD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur mendapatkan perolehan PAD terbanyak dengan total Rp19.327.125.485,40 yang disebabkan adanya kontribusi lebih dari sektor pajak daerah mengenai pemberian intensif pajak daerah atau pemutihan pajak seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain-lain sebagainya yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Di sisi lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memberikan fasilitas terhadap masyarakat guna membayar pajak. Bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pemerintah provinsi melakukan berbagai program seperti memberi sebuah tabungan umroh. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur juga tetap berupaya untuk menggali penerimaan daerah dengan cara bekerja

sama dengan mitra jaringan *retail* nasional seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain sebagainya.⁸² Perkembangan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik 4.1.

Grafik 4.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2020 (data diolah)

Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan PAD dari Rp19.327.125.485.405,90 menjadi Rp17.951.235.057.953,00. Hal tersebut dikarenakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Meskipun PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 mengalami penurunan akan tetapi hal tersebut merupakan capaian yang cukup tinggi jika dibandingkan dari target yang diperkirakan sebelumnya yaitu sebesar Rp15.448.000.000.000,00.

⁸²Hilda Meilisa, "Realisasi Pajak Daerah Jatim di Tahun 2019 Capai 15 Triliun", (<https://news.detik.com>), pada 9 Maret 2022

Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap masyarakat Jawa Timur, hal tersebut dikarenakan pemerintah provinsi berharap target penerimaan setiap daerah menjadi meningkat dan terus menggali secara luas sektor-sektor penerimaan daerah guna meningkatkan PAD.⁸³

Berdasarkan lampiran 1 mengenai PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan setiap tahunnya. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 penerimaan PAD terendah ialah Kota Batu dengan total Rp136.770.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan penerimaan Kota Batu pada PAD tersebut setengah pendapatannya yang berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah pada sektor pariwisata, hiburan, restoran, serta hotel menjadi berkurang.

Di sisi lain, pemasukan pajak daerah yang sedikit maka pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan berupa pembebasan penarikan retribusi pasar, kebersihan, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tutupnya kawasan sektor wisata serta kebijakan pembebasan retribusi daerah menjadi berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang sedikit.⁸⁴

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 penerimaan PAD tertinggi ialah Kota Surabaya dengan total PAD sebesar Rp4.289.960.000,00.

⁸³Dian Kurniawan

⁸⁴Heryanto, "Dampak COVID-19, PAD Kota Batu Hilang Rp 80,8 Miliar", (<https://jatimtimes.com>), pada 13 Juni 2022

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur sudah wajar jika mendapatkan penerimaan PAD tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dikarenakan Kota Surabaya terkenal sebagai pusat kawasan perekonomian Provinsi Jawa Timur.

4. Pajak Daerah (X1)

Pajak daerah ialah sebuah pajak yang ditangani oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten atau kota yang berfungsi untuk menunjang PAD serta total pendapatan tersebut akan menjadi bagian dari APBD.⁸⁵ Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, parkir, dan lain-lain sebagainya. Penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah
2016	12.772.227.117.585,00
2017	14.350.601.626.319,00
2018	15.060.713.325.040,00
2019	15.522.201.423.333,00
2020	14.412.362.319.502,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2020

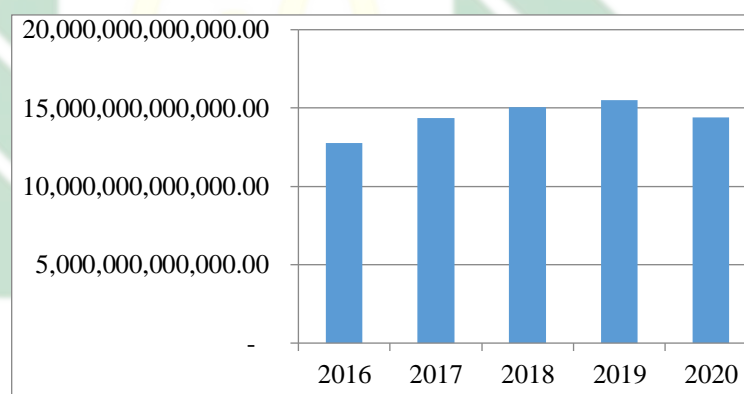
Berdasarkan tabel di atas mengenai pajak daerah pada Provinsi Jawa Timur setiap tahun mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur mendapatkan perolehan pajak daerah yang cukup besar senilai Rp15.522.201.423.333,00. Hal tersebut dikarenakan adanya program pemutihan pajak yang dilakukan oleh Badan

⁸⁵Yoyo Sudaryo dkk et al Op. Cit Hlm 105

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditujukan untuk masyarakat Provinsi Jawa Timur guna membayar pajak daerah.

Dengan adanya program pemutihan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat guna meningkatkan PAD. Di sisi lain, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kegiatan ekonomi masyarakat.⁸⁶ Perkembangan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik 4.2.

Grafik 4.2
Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2020 (data diolah)

Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pendapatan pajak daerah yang disebabkan adanya COVID-19 senilai Rp14.412.362.319.502,00. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan akan tetapi Provinsi Jawa Timur telah melakukan beberapa upaya pengoptimalan pajak seperti pajak bea balik kendaraan bermotor

⁸⁶Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, "Tahun 2019, Total Realisasi dari Pajak Daerah Jatim Capai 104,27 Persen", (<http://kominfo.jatimprov.go.id>), pada 13 Juni 2022

yang pada awalnya penarikan hanya sebesar 10% akan tetapi pada tahun 2020 menjadi 12%.

Di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan beberapa langkah intensifikasi dan ekstensifikasi guna penarikan pajak. Bekerja sama dengan pelayanan samsat di setiap kabupaten/kota pemerintah provinsi yakin bahwa penerimaan pajak pajak bea balik kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor sebagai kontributor tertinggi mampu untuk mencapai target.⁸⁷

Berdasarkan lampiran 2 mengenai pajak daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan setiap tahunnya. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah terendah ialah Kabupaten Sampang dengan total Rp27.480.000.000,00 akan tetapi hal tersebut merupakan capaian yang luar biasa dikarenakan mampu melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp26.000.000.000,00.

Di sisi lain, meskipun terjadi peningkatan pada penerimaan pajak daerah telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan akan tetapi penerimaan PAD Kabupaten Sampang tahun 2020 belum melampaui target. Pemerintah Kabupaten Sampang akan selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah guna PAD menjadi meningkat.⁸⁸

⁸⁷Peni Widarti, "Dampak Covid-19, PAD Jatim Diperkirakan Turun 30 Persen", (<https://surabaya.bisnis.com>), pada 16 Maret 2022

⁸⁸Zamachsari, "PAD Sampang 2020 Anjlok", (<https://beritajatim.com>), pada 9 Maret 2022

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah tertinggi ialah Kota Surabaya dengan total Rp3.277.050.000,00. Kota Surabaya sendiri meskipun mendapatkan penerimaan pajak daerah yang cukup banyak setiap tahunnya akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran dikarenakan adanya pandemi COVID-19.⁸⁹

5. Retribusi Daerah (X2)

Retribusi daerah ialah sebuah penarikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan yang sudah memanfaatkan jasa atau pelayanan yang telah difasilitasi oleh pemerintah dengan terdapat kontra prestasi yang bersifat langsung oleh masyarakat.⁹⁰ Retribusi daerah sebagai komponen yang ada pada PAD mempunyai kontribusi cukup besar terhadap PAD. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 4.3

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁹Kodrat Setiawan, "Target Pendapatan Asli Daerah Surabaya Bakal Direvisi", (<https://bisnis.tempo.co>), pada 9 Maret 2022

⁹⁰Damas Dwi Anggoro Op. Cit Hlm 240

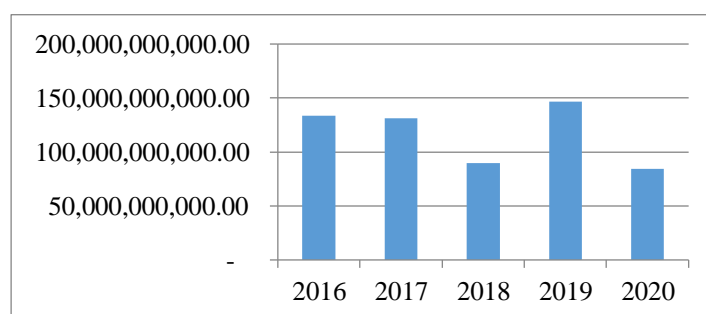
Tabel 4.3
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016-2020 (Rupiah)

Tahun	Retribusi Daerah
2016	133.587.973.920,00
2017	131.444.291.907,00
2018	89.881.270.362,22
2019	146.815.818.226,84
2020	84.190.144.969,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas penerimaan retribusi daerah pada Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami perkembangan yang naik dan turun. Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur mendapatkan perolehan retribusi daerah yang cukup besar senilai Rp146.815.818.226,84. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya kontribusi cukup banyak yang berasal dari sektor-sektor yang ada pada retribusi daerah yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah menjadi meningkat. Perkembangan retribusi daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik 4.3.

Grafik 4.3
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016-2020 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2020 (data diolah)

Pada tahun 2018 dan 2020 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pendapatan retribusi daerah. Pada tahun 2018 pendapatan retribusi daerah menurun sebesar Rp89.881.270.362,22 hingga pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali hingga mendapatkan penerimaan sebesar Rp146.815.818.226,84.

Akan tetapi pada tahun 2020 adanya pandemi COVID-19 pendapatan retribusi daerah menurun kembali senilai Rp84.190.144.969,00. Adanya pandemi COVID-19 dengan penerapan seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menyebabkan kegiatan perekonomian terutama pada sektor retribusi menurun.

Berdasarkan lampiran 3 mengenai retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan setiap tahunnya. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 penerimaan retribusi daerah terendah ialah Kota Batu dengan total Rp4.640.000.000,00. Meskipun Kota Batu mendapatkan perolehan retribusi yang cukup sedikit akan tetapi Pemerintah Kota Batu sudah berupaya dalam mengatasi kondisi ekonomi tersebut dengan cara melakukan pembebasan penarikan retribusi pasar, kebersihan, dan PDAM.⁹¹

Pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha guna memulihkan kegiatan perekonomian. Jika sektor wisata seperti

⁹¹Heryanto

hotel, restoran dan tempat wisata dibuka kembali akan berakibat kepada peningkatan pendapatan pelaku-pelaku usaha masyarakat daerah sekitar, retribusi daerah, dan PAD.⁹²

Di sisi lain penerimaan retribusi daerah tertinggi ialah Kota Surabaya dengan total Rp301.270.000.000,00. Keadaan perekonomian Kota Surabaya meskipun dalam pandemi akan tetapi bisa bertahan dengan masih adanya sektor perdagangan besar hingga eceran, resparasi mobil dan sepeda motor, dan penyediaan akomodasi serta minuman sehingga menyebabkan penerimaan retribusi daerah tetap terkendali.⁹³

6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sebuah penerimaan bagi suatu wilayah yang bersumber dari pendapatan perusahaan yang dimiliki oleh sebuah daerah serta pengelolaan akan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁹⁴ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, dan perusahaan milik kelompok masyarakat atau swasta. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 4.4.

⁹²Budhi Santoso, "Pelaku Usaha Sektor Pariwisata di Kota Batu Terima BST", (<https://www.antaraneews.com>), pada 13 Juni 2022

⁹³Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, "Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2021", (<https://www.bi.go.id>), pada 13 Juni 2022

⁹⁴Abdul Halim, loc. it

Tabel 4.4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)

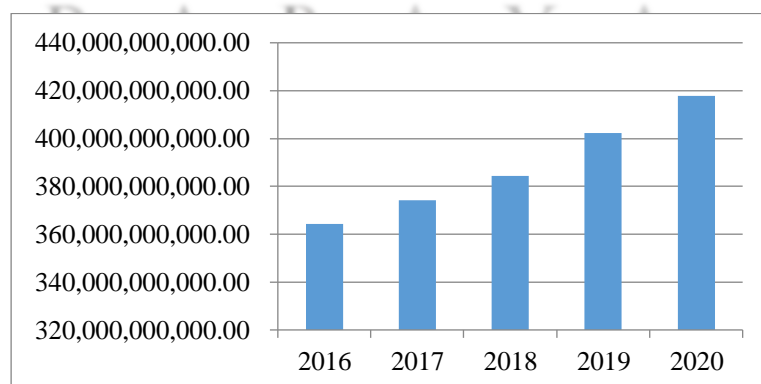
Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2016	364.325.988.476,00
2017	374.274.618.110,00
2018	384.285.224.116,80
2019	402.298.606.128,80
2020	417.764.005.747,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 setiap tahunnya mengalami perkembangan yang meningkat. Provinsi Jawa Timur memiliki BUMD seperti PT. Sier, Bank Jatim, Perusahaan Daerah Air Bersih, dan lain-lain sebagainya. Perkembangan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik 4.4.

Grafik 4.4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2020 (data diolah)

Pada tahun 2020 meskipun terjadi pandemi COVID-19 Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang cukup besar senilai Rp417.764.005.747,60. Hal tersebut dikarenakan adanya BUMD yang terus berkembang. Adanya kerja sama dengan masyarakat serta antara BUMD satu dengan lainnya menyebabkan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi terhadap PAD.

BUMD Provinsi Jawa Timur mempunyai peran yang penting guna pembangunan di setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang bersifat khusus. BUMD Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa bidang usaha seperti keuangan, usaha lainnya, air, serta migas. BUMD tersebut ialah Bank Jatim, PT. Sier, Perusahaan Daerah Air Bersih, dan lain-lain sebagainya.⁹⁵

Berdasarkan lampiran 4 mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan setiap tahunnya. Provinsi Jawa Timur tahun 2020 perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terendah ialah Kota Blitar dengan total Rp1.041.098.840,30. Hal tersebut sejalan dengan adanya penurunan target PAD dari Rp174.000.000.000,00 menjadi

⁹⁵Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur, “BUMD Jatim”, (<https://bumd.jatimprov.go.id>), pada 13 Juni 2022

Rp108.000.000.000,00.⁹⁶ Adanya penurunan target tersebut berdampak pada penerimaan sumber-sumber yang ada pada PAD.

Di sisi lain penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Blitar tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,95% jika dibandingkan dengan tahun 2019 dari Rp1.169.069.219,24 menjadi Rp1.041.098.840,30 yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang belum selesai.⁹⁷

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi ialah Kabupaten Bojonegoro dengan total sebesar Rp143.500.000.000,00. Peningkatan perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 tersebut disebabkan adanya kontribusi dari BUMD seperti PT. Bank Jatim, PD BPR Bojonegoro, BPR Jawa Timur, dan lain-lain sebagainya.

Meskipun salah satu BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro seperti Griya Darma Kusuma tidak dapat berkontribusi terhadap penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 yang disebabkan terjadinya kerugian. Akan tetapi hal tersebut tidak berdampak pada penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

⁹⁶Pemerintah Kota Blitar, “Dampak Wabah Corona, PAD Kota Blitar Turun 66 Miliar Rupiah”, (<https://covid19.blitarkota.go.id>), pada 14 Juni 2022

⁹⁷Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Kota Blitar, “Pemerintah Kota Blitar Catatan Atas Laporan Keuangan”, (<http://ppid.blitarkota.go.id/dokumen>), pada 13 Juni 2022

Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 meskipun di sisi lain terjadi pandemi COVID-19.⁹⁸

7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah sebuah penerimaan pada suatu wilayah yang bersumber dari lain-lain kepemilikan pemerintah daerah.⁹⁹ Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan lain-lain sebagainya. Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Tahun	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2016	2.547.653.944.816,00
2017	2.455.030.095.984,00
2018	2.996.182.202.304,35
2019	3.255.809.637.717,81
2020	3.036.918.587.733,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2020

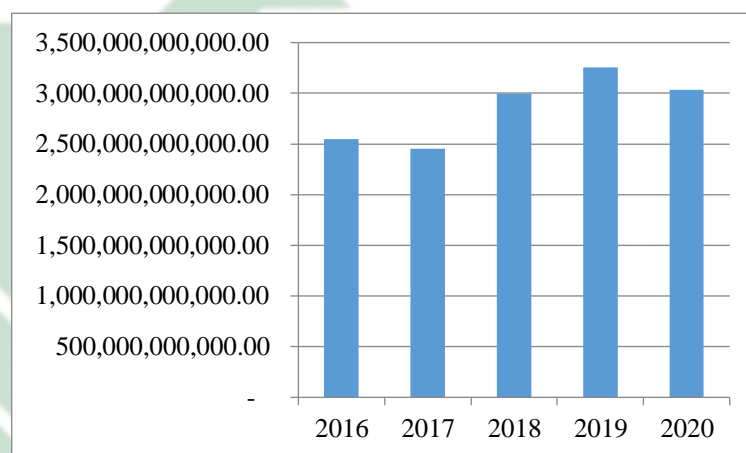
Berdasarkan tabel di atas penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 setiap tahunnya mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 Provinsi Jawa

⁹⁸Pemkab Bojonegoro, "Badan Usaha Milik Daerah", (<https://bojonegorokab.go.id>), pada 16 Maret 2022

⁹⁹Abdul Halim, loc. it

Timur memiliki pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tertinggi yaitu sebesar Rp3.255.809.637.717,81. Perkembangan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik 4.5.

Grafik 4.5
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2020 (data diolah)

Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID-19 Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tertinggi yaitu sebesar Rp3.036.918.587.733,58. Hal tersebut terjadi penurunan yang cukup sedikit jika dibandingkan tahun 2019 dari Rp3.255.809.637.717,81 menjadi Rp3.036.918.587.733,58.

Berdasarkan lampiran 5 mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan setiap tahunnya. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

terendah ialah Kota Batu dengan total Rp14.340.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan sejalan dengan adanya penurunan target penerimaan PAD Kota Batu 2020.

Adanya penurunan target penerimaan PAD tersebut meskipun terjadi pandemi COVID-19 di sisi lain disebabkan karena kinerja pemerintah Kota Batu yang tidak bekerja secara maksimal untuk pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang tidak selaras dengan asumsi kerangka otonomi daerah.¹⁰⁰

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 dengan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tertinggi ialah Kabupaten Sidoarjo dengan total Rp772.697.026.904,70. Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo 2020 menyebabkan terjadinya penurunan target penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 10,95%.¹⁰¹

B. Analisis Data

1. Model Regresi Data Panel

a. Model *Common Effect*

Model *common effect* atau bisa disebut *pooled least square* ialah sebuah teknik pada regresi data panel di mana pada saat observasi model ini mempunyai regresi yang mengakibatkan data

¹⁰⁰Tinko Sidin, “Akibat Covid-19, Proyeksi Pendapatan Kota Batu Menurun Drastis”, (<https://kabarmalang.com>), pada 11 April 2022

¹⁰¹Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, “Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Turun Hingga Rp 583,4 Miliar”, (<https://jatim.bpk.go.id>), pada 13 Juni 2022

tersebut menjadi dimensi tunggal. Hasil pengujian dengan menggunakan model *common effect* pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Model *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13037332	5410217,	-2,409761	0,0169
PAJAK	0,826468	0,014256	57,97321	0,0000
RETRIBUSI	1,833667	0,135829	13,49979	0,0000
HASIL	2,279960	0,163487	13,94578	0,0000
LAIN	1,021958	0,027068	37,75481	0,0000
R-squared	0,997872	Mean dependent var		4,88E+08
Adjusted R-squared	0,997826	S.D. dependent var		7,63E+08
S.E. of regression	35576179	Akaike info criterion		37,63821
Sum squared resid	2,34E+17	Schwarz criterion		37,72366
Log likelihood	-3570,630	Hannan-Quinn criter.		37,67283
F-statistic	21688,51	Durbin-Watson stat		1,276995
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Hasil Output Eviews 9

b. Model *Fixed Effect*

Model ini merupakan estimasi pada data panel dengan memanfaatkan variabel dummy guna menemukan terdapatnya perbedaan intersep. Model ini biasanya disebut sebagai teknik LSDV. Hasil pengujian dengan menggunakan model *fixed effect* pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7086518,	14267857	0,496677	0,6202
PAJAK	0,702068	0,035393	19,83631	0,0001
RETRIBUSI	1,939619	0,157354	12,32649	0,0002
HASIL	2,795557	0,170846	16,36304	0,0003
LAIN	1,017404	0,060216	16,89602	0,0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0,998600	Mean dependent var		4,88E+08
Adjusted R-squared	0,998212	S.D. dependent var		7,63E+08
S.E. of regression	32266155	Akaike info criterion		37,60923
Sum squared resid	1,54E+17	Schwarz criterion		38,32699
Log likelihood	-3530,877	Hannan-Quinn criter.		37,89998
F-statistic	2574,225	Durbin-Watson stat		1,923208
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Hasil Output Eviews 9

c. Model *Random Effect*

Model *random effect* ialah model estimasi dari data panel di mana variabel gangguan akan bisa saling mempunyai hubungan berupa setiap waktu dan individu. Hasil pengujian dengan menggunakan model *random effect* pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13037332	4906848,	-2,656967	0,0086
PAJAK	0,826468	0,012930	63,92040	0,0000
RETRIBUSI	1,833667	0,123192	14,88466	0,0000
HASIL	2,279960	0,148277	15,37641	0,0000
LAIN	1,021958	0,024550	41,62788	0,0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0,000000	0,0000
Idiosyncratic random			32266155	1,0000
Weighted Statistics				
R-squared	0,997872	Mean dependent var		4,88E+08
Adjusted R-squared	0,997826	S.D. dependent var		7,63E+08
S.E. of regression	35576179	Sum squared resid		2,34E+17
F-statistic	21688,51	Durbin-Watson stat		1,276995
Prob(F-statistic)	0,000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0,997872	Mean dependent var		4,88E+08
Sum squared resid	2,34E+17	Durbin-Watson stat		1,276995

Sumber: Hasil Output Eviews 9

2. Hasil Uji Spesifikasi Model

a. Uji Chow

Cara pertama pada uji spesifikasi model pada data panel ialah dengan cara uji chow menggunakan efek spesifikasi berupa *fixed*.

Hal tersebut berfungsi guna memahami model manakah yang layak untuk digunakan yaitu berupa *fixed effect* atau *common effect*.

Apabila nilai probabilitas chi-square lebih kecil dari 0,05 lantas H_0 ditolak serta H_1 diterima. Maka model yang layak digunakan ialah *fixed effect model*. Sebaliknya apabila nilai probabilitas chi-square lebih besar dari 0,05 lantas H_0 diterima serta H_1 ditolak. Maka model yang layak digunakan ialah *common effect model*.

Keterangan:

Ho : *Common Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 4.9
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,078469	(37,148)	0,0011
Cross-section Chi-square	79,507099	37	0,0001

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan hasil uji chow yang sudah dilakukan menghasilkan bahwa nilai output pada chi-square senilai 0,0001. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 lantas Ho ditolak H1 diterima. Maka dapat disimpulkan model yang layak digunakan ialah *fixed effect model*.

b. Uji Hausman

Uji hausman berfungsi sebagai memahami apakah *random effect model* lebih layak digunakan jika dibandingkan dengan *fixed effect model*. Apabila nilai probabilitas chi-square lebih kecil dari 0,05 lantas Ho ditolak serta H1 diterima. Maka model yang layak digunakan ialah *fixed effect model*. Sebaliknya apabila nilai probabilitas chi-square lebih besar dari 0,05 lantas Ho diterima serta H1 ditolak. Maka model yang layak digunakan ialah *random effect model*.

Keterangan:

Ho : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 4.10
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	72,700401	4	0,0000

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan hasil uji hausman yang sudah dilakukan menghasilkan bahwa nilai output pada probabilitas cross-section random senilai 0,0000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 lantas Ho ditolak H1 diterima. Maka model yang layak digunakan ialah *fixed effect model*.

3. Hasil Keputusan Model

Sesuai dengan model pengujian yang ada pada data panel seperti model *common effect*, model *fixed effects*, dan model *random effect* yang selanjutnya diolah dengan uji spesifikasi model guna menentukan model manakah yang layak untuk bisa digunakan dalam penelitian ini. Maka berdasarkan dengan nilai pada uji chow dan uji hausman sebesar 0,0001 dan 0,0000 lantas, bisa diambil keputusan model yang layak digunakan ialah *fixed effect model*.

4. Analisis Statistik Deskriptif

Sesuai dengan analisis regresi data panel yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka model yang layak dipakai dalam penelitian ini ialah *fixed effect model* dengan persamaan regresi antara lain sebagai berikut:

$$Y = 7086518 + 0,702068X_1 + 1,939619X_2 + 2,795557X_3 + 1,017404X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

- a. Nilai koefisien β_0 sebesar 7086518. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan X sebesar 0 maka nilai koefisien PAD sebesar 7086518.
- b. Nilai koefisien β_1 sebesar 0,702068. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka di sisi lain PAD juga mengalami kenaikan sebesar 0,70%. Adanya hubungan positif menjelaskan bahwa apabila semakin besar penerimaan pajak daerah maka akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang semakin besar pula.
- c. Nilai koefisien β_2 sebesar 1,939619. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka di sisi lain PAD juga mengalami kenaikan sebesar 1,93%. Adanya hubungan positif menjelaskan bahwa apabila semakin

besar penerimaan retribusi daerah maka akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang semakin besar pula.

- d. Nilai koefisien β_3 sebesar 2,795557. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 1% maka di sisi lain PAD juga mengalami kenaikan sebesar 2,79%. Adanya hubungan positif menjelaskan bahwa apabila semakin besar penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang semakin besar pula.
- e. Nilai koefisien β_4 sebesar 1,017404. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 1% maka di sisi lain PAD juga mengalami kenaikan sebesar 1,01%. Adanya hubungan positif menjelaskan bahwa apabila semakin besar penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maka akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang semakin besar pula.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi sebagai menguji sebuah model regresi antara variabel *independen* dan *dependen* apakah memiliki distribusi yang normal atau tidak normal. Hasil pengujian uji normalitas pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	537,3726
Probability	0,800000

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan nilai uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebanyak 0,800000. Lantas nilai tersebut lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data pada penelitian ini merupakan data dengan distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berfungsi sebagai menguji sebuah model regresi pada setiap variabel *independen* apakah memiliki korelasi atau tidak. Jika koefisien setiap variabel *independen* menghasilkan nilai lebih besar dari 0,8 bisa disimpulkan jika model tersebut terjadi permasalahan berupa multikolinieritas. Akan tetapi jika koefisien setiap variabel independen menghasilkan nilai lebih kecil dari 0,8 bisa disimpulkan jika model tersebut tidak terjadi permasalahan berupa multikolinieritas.¹⁰² Hasil pengujian uji multikolinieritas pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinieritas

	PAJAK	RETRIBUSI	HASIL	LAIN
PAJAK	1,000000	0,949153	0,808936	0,700771
RETRIBUSI	0,949153	1,000000	0,805050	0,702730
HASIL	0,808936	0,805050	1,000000	0,615122
LAIN	0,700771	0,702730	0,615122	1,000000

Sumber: Hasil Output Eviews 9

¹⁰²Damodar N. Gujarati dan dawn C, Porter Op. Cit Hlm 258

Berdasarkan nilai uji multikolinieritas tersebut menunjukkan bahwa hasil koefisien yang berasal dari variabel bebas yaitu sebanyak 0,949153, 0,808936, dan 0,700771. Maka hal tersebut terdapat 2 nilai koefisien seperti 0,949153 dan 0,808936 melebihi dari 0,8 yang menunjukkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini terjadi multikolinieritas. Lantas, dengan adanya multikolinieritas pada penelitian ini selanjutnya dilakukan perubahan data dengan cara merubah menjadi log untuk kesembuhan data. Adapun hasil kesembuhan data tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Log Multikolinieritas

	LOG (PAJAK)	LOG (RETRIBUSI)	LOG (HASIL)	LOG (LAIN)
LOG(PAJAK)	1,000000	0,768509	0,615386	0,454999
LOG(RETRIBUSI)	0,768509	1,000000	0,625609	0,639321
LOG(HASIL)	0,615386	0,625609	1,000000	0,414000
LOG(LAIN)	0,454999	0,639321	0,414000	1,000000

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan nilai uji multikolinieritas tersebut yang sudah dirubah menjadi log menunjukkan bahwa hasil koefisien yang berasal dari variabel bebas yaitu sebanyak 0,768509, 0,615386, dan 0,454999. Lantas nilai koefisien tersebut kurang dari 0,8 yang menunjukkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi sebagai menguji sebuah model regresi guna mempunyai perbedaan varians yang berasal dari residual satu pengamatan kepada pengamatan yang lainnya. Hasil pengujian uji heteroskedastisitas pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,003282	0,010875	-0,301741	0,7633
PAJAK	2,03E-11	2,70E-11	0,753568	0,4523
RETRIBUSI	4,43E-11	1,20E-10	0,369190	0,7125
HASIL	1,45E-10	1,30E-10	1,115352	0,2665
LAIN	1,06E-10	4,59E-11	2,305096	0,0226

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan nilai uji heteroskedastisitas tersebut menunjukkan bahwa hasil resabs pada probabilitas setiap variabel yaitu sebanyak 0,7633, 0,4523, 0,7125, 0,2665, dan 0,0226. Maka hal tersebut terdapat 1 hasil resabs pada probabilitas seperti 0,0226 kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Lantas, dengan adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini, selanjutnya dilakukan perubahan data dengan cara merubah menjadi log untuk kesembuhan data. Adapun hasil kesembuhan data tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Log Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-20,60571	12,45801	-1,654013	0,1002
LOG(PAJAK)	0,136653	0,551897	0,247607	0,8048
LOG(RETRIBUSI)	0,054379	0,382120	0,142309	0,8870
LOG(HASIL)	0,080183	0,332244	0,241337	0,8096
LOG(LAIN)	0,615331	0,478852	1,285011	0,2008

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan nilai uji log heteroskedastisitas tersebut menunjukkan bahwa hasil resabs pada probabilitas setiap variabel yaitu sebanyak 0,1002, 0,8048, 0,8870, 0,8096, dan 0,2008. Lantas hasil resabs pada probabilitas setiap variabel tersebut lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pada data penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berfungsi sebagai menguji sebuah model regresi apakah terdapat korelasi pada setiap kesalahan gangguan antara periode waktu atau ruang saat ini dengan sebelumnya.

Keterangan:

Nilai n : 190

Nilai k : 4

Nilai dL : 1,7198

Nilai dU : 1,8057

Adapun hasil dari uji autokorelasi pada penelitian ini dengan menggunakan metode *fixed effect model* ialah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	4,88E+08
S.D. dependent var	7,63E+08
Akaike info criterion	37,60923
Schwarz criterion	38,32699
Hannan-Quinn criter.	37,89998
Durbin-Watson stat	1,923208

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan nilai uji autokorelasi tersebut dengan memanfaatkan *fixed effect model* menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson stat sebanyak 1,923208. Nilai d sebesar 1,9232 yang lebih besar dari nilai dU sebesar 1,8057 dan nilai (4-d) sebesar 2,076792 yang lebih besar dari nilai dU sebesar 1,8057. Lantas hasil uji autokorelasi tersebut menunjukkan bahwa pada data penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

6. Hasil Uji Simultan (F)

Uji simultan berfungsi untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel *independen* atau bebas terhadap variabel *dependen* atau terikat secara keseluruhan. Langkah-langkah dalam mengetahui bagaimana hasil dari uji simultan ialah memahami hasil uji statistik F. Hasil pengujian uji simultan (F) pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Simultan (F)

Log likelihood	-3530,877
F-statistic	2574,225
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan hasil uji F menjelaskan bahwa hasil F hitung senilai 2574,225 dan probabilitas F senilai 0,000000. Sesuai dengan nilai signifikansi yang ditetapkan sebelumnya sebesar 0,05 maka nilai probabilitas F tersebut kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa uji simultan (f) mengalami signifikan atau semua variabel *independen* pada penelitian ini seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap variabel *dependen* yang berupa PAD.

7. Hasil Uji Parsial (t)

Uji parsial berfungsi untuk mengetahui bagaimana pengaruh setiap variabel *independen* atau bebas terhadap variabel *dependen* atau terikat. Hasil pengujian uji parsial (t) pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Parsial (t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7086518,	14267857	0,496677	0,6202
PAJAK	0,702068	0,035393	19,83631	0,0001
RETRIBUSI	1,939619	0,157354	12,32649	0,0002
HASIL	2,795557	0,170846	16,36304	0,0003
LAIN	1,017404	0,060216	16,89602	0,0000

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Sesuai dengan hasil uji parsial (t) menjelaskan bahwa hasil setiap masing-masing variabel *independen* seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap variabel *dependen* yang berupa PAD.

a. Pajak Daerah (X1)

Sesuai dengan hasil uji parsial (t), pajak daerah sebagai variabel X1 menunjukkan bahwa hasil t hitung sebanyak 19,83631 dan hasil probabilitas sebanyak 0,0001. Berdasarkan dengan nilai signifikansi yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 0,05 lantas variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PAD.

b. Retribusi Daerah (X2)

Sesuai dengan hasil uji parsial (t), retribusi daerah sebagai variabel X2 menunjukkan bahwa hasil t hitung sebanyak 12,32649 dan hasil probabilitas sebanyak 0,0002. Berdasarkan dengan nilai signifikansi yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 0,05 lantas variabel retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PAD.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3)

Sesuai dengan hasil uji parsial (t), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai variabel X3 menunjukkan bahwa hasil t hitung sebanyak 16,36304 dan hasil probabilitas sebanyak 0,0003. Berdasarkan dengan nilai signifikansi yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 0,05 lantas variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PAD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4)

Sesuai dengan hasil uji parsial (t), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel X4 menunjukkan bahwa hasil t hitung sebanyak 16,89602 dan hasil probabilitas sebanyak 0,0000. Sesuai dengan nilai signifikansi yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 0,05 lantas variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PAD.

8. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Uji koefisien determinasi R² berfungsi untuk mengetahui bagaimana kontribusi pada variabel *independen* atau bebas terhadap variabel *dependen* atau terikat. Hasil pengujian uji koefisien determinasi R² pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

R-squared	0,998600
Adjusted R-squared	0,998212
S.E. of regression	32266155
Sum squared resid	1,54E+17

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Sesuai dengan hasil pengujian yang sudah dilakukan maka hasil koefisien determinan sebanyak 0,998212. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempunyai

kontribusi sebesar 99,82% terhadap PAD. Sedangkan sisa dari kontribusi tersebut sebesar 0,18% merupakan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

9. Hasil Uji Koefisien Beta atau Analisis Elastisitas

Uji koefisien beta atau analisis elastisitas ialah sebuah pengujian yang berfungsi untuk mengetahui variabel bebas (X) yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Pada pengujian ini menghasilkan bagaimana hasil perubahan atau variasi pada setiap variabel. Maka hasil uji koefisien beta atau analisis elastisitas pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji Koefisien Beta

No	$\epsilon = \beta_i \frac{\bar{X}_i}{\bar{Y}}$
1	$\epsilon_1 = 0,702068 \frac{235.184.342.661}{488.202.464.868} = 0,338$
2	$\epsilon_2 = 1,939619 \frac{35.648.001.229}{488.202.464.868} = 0,141$
3	$\epsilon_3 = 2,795557 \frac{12.234.498.263}{488.202.464.868} = 0,070$
4	$\epsilon_4 = 1,017404 \frac{209.017.018.892}{488.202.464.868} = 0,435$

Sumber: Hasil Uji Koefisien Beta

Sesuai dengan hasil uji di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (X) yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) dalam penelitian ini ialah variabel X4 atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut dikarenakan hasil ϵ_4 mempunyai

nilai absolute elastisitas yang paling besar yaitu sebanyak 0,435 jika dibandingkan nilai absolut elastisitas pada variabel X lainnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Sesuai dengan nilai t hitung pada variabel pajak daerah ialah sebanyak 19,83631 dan hasil probabilitas pada variabel pajak daerah ialah sebanyak 0,0001. Hasil probabilitas tersebut menunjukkan bahwa hasil tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikansi sebanyak 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima yang artinya pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD.

Provinsi Jawa Timur pada sektor pajak daerah dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami perkembangan yang meningkat. Penerimaan pajak daerah terbesar yaitu pada tahun 2019 sebanyak Rp15.522.201.423.333,00 hal tersebut dikarenakan adanya program pemutihan pajak yang ditujukan untuk masyarakat Provinsi Jawa Timur guna membayar pajak daerah.¹⁰³

Dengan adanya program pemutihan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan PAD. Di sisi lain hal tersebut bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan dan kegiatan perekonomian masyarakat Provinsi Jawa Timur.¹⁰⁴

¹⁰³Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, “Tutup Tahun 2019, Total Realisasi PAD Jatim dari Pajak Daerah Capai 104,27%”, (<https://www.dipendajetim.go.id>), pada 13 Juni 2022

¹⁰⁴Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pendapatan pajak daerah dengan penerimaan sebesar Rp14.412.362.319.502,00. Meskipun terjadi penurunan pendapatan akan tetapi hal tersebut telah dilakukan beberapa upaya guna pemulihan ekonomi berupa pengoptimalan pajak seperti pajak bea balik kendaraan bermotor yang pada awalnya penarikan hanya sebesar 10% akan tetapi pada tahun 2020 menjadi 12% guna memulihkan perekonomian pada sektor pajak daerah.

Di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan beberapa langkah intensifikasi dan ekstensifikasi guna penarikan pajak. Bekerja sama dengan pelayanan samsat di setiap kabupaten/kota pemerintah provinsi yakin bahwa penerimaan pajak pajak bea balik kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor sebagai kontributor tertinggi mampu untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.¹⁰⁵

Penerimaan pajak daerah yang paling terendah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 ialah Kabupaten Sampang dengan total Rp27.480.000.000,00 akan tetapi hal tersebut merupakan capaian yang luar biasa dikarenakan mampu melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp26.000.000.000,00.

Di sisi lain, meskipun terjadi peningkatan pada penerimaan pajak daerah yang telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan akan tetapi penerimaan PAD Kabupaten Sampang tahun 2020 belum melampaui

¹⁰⁵Peni Widarti

target. Pemerintah Kabupaten Sampang akan selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah guna PAD menjadi meningkat.¹⁰⁶

Penerimaan pajak daerah yang paling tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 ialah Kota Surabaya dengan total Rp3.277.050.000,00. Kota Surabaya sendiri meskipun mendapatkan penerimaan pajak daerah yang cukup banyak setiap tahunnya akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran dikarenakan adanya pandemi COVID-19.¹⁰⁷

Menurut Rochmat Soemitro & Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak ialah iuran yang berasal dari rakyat yang nantinya akan menjadi kas negara yang mempunyai sifat mengikat dan memaksa dengan imbalan bersifat tidak langsung yang digunakan untuk masyarakat dan keperluan umum.¹⁰⁸

Adanya penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, parkir, dan lain-lain sebagainya yang banyak berkontribusi terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 hal tersebut disebabkan karena pajak daerah ialah sebuah penarikan yang sifatnya mengikat dan memaksa untuk seluruh masyarakat. Maka dengan terdapatnya penerimaan tersebut akan digunakan untuk pembangunan ekonomi pada setiap daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

¹⁰⁶Zamachsari

¹⁰⁷Kodrat Setiawan

¹⁰⁸Dwi Sunar Prasetyono

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Sudarmana Putu Agus & Gede Mertha Sudiarta (2020) mengenai pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap PAD di Dinas Pendapatan Daerah yang menyebutkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan PAD Kabupaten Badung tahun 2008 hingga 2018. Adanya peningkatan pada pajak daerah akan berpengaruh pula terhadap peningkatan PAD Kabupaten Badung tahun 2008 hingga 2018.¹⁰⁹

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Joko Mariyanto (2015) mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD yang menjelaskan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 hingga 2013.¹¹⁰

B. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Sesuai dengan nilai t hitung pada variabel retribusi daerah ialah sebanyak 12,32649 dan hasil probabilitas pada variabel retribusi daerah ialah sebanyak 0,0002. Hasil probabilitas tersebut menunjukkan bahwa hasil tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikansi sebanyak 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima

¹⁰⁹I Sudarmana Putu Agus & Gede Mertha Sudiarta. 2020. "Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah".E-Jurnal Manajemen, Vol 9, No. 4

¹¹⁰Joko Mariyanto. 2015. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah".Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol 11, No. 1

yang artinya retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD.

Provinsi Jawa Timur pada sektor retribusi daerah dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami perkembangan. Penerimaan retribusi daerah tertinggi ialah pada tahun 2019 sebesar Rp146.815.818.226,84. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya kontribusi yang berasal dari sektor-sektor yang ada pada retribusi daerah sehingga menyebabkan penerimaan retribusi daerah menjadi meningkat.

Pada tahun 2018 dan 2020 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pendapatan retribusi daerah. Pada tahun 2018 pendapatan retribusi daerah menurun senilai Rp89.881.270.362,22 hingga pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali mendapatkan penerimaan sebesar Rp146.815.818.226,84. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 dengan adanya penerapan seperti PPKM dan PSBB yang menyebabkan kegiatan perekonomian terutama pada sektor retribusi menurun. Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pendapatan retribusi daerah dengan penerimaan sebesar Rp84.190.144.969,00.

Penerimaan retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 terendah ialah Kota Batu dengan total Rp4.640.000.000,00. Meskipun penerimaan retribusi daerah Kota Batu

pada tahun 2020 cukup sedikit akan tetapi pemerintah daerah Kota Batu berupaya dalam pemulihan ekonomi dengan cara menargetkan penerimaan retribusi dari sektor parkir tepi jalan sebanyak Rp8.000.000.000,00. Di sisi lain, adanya perubahan peraturan daerah mengenai parkir tepi jalan yang sudah bisa dilaksanakan mulai tahun 2021.¹¹¹

Pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha guna memulihkan kegiatan perekonomian. Jika sektor wisata seperti hotel, restoran, dan tempat wisata dibuka kembali maka akan berakibat kepada peningkatan pendapatan pelaku-pelaku usaha masyarakat daerah sekitar, retribusi daerah, dan PAD.¹¹²

Penerimaan retribusi daerah yang paling tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 ialah Kota Surabaya dengan total Rp301.270.000.000,00. Hal tersebut sejalan dengan adanya pembebasan penarikan retribusi daerah pada sektor sentra wisata kuliner atau SWK yang berfungsi untuk kegiatan perekonomian tetap berjalan meskipun terjadi pandemi COVID-19.¹¹³

Di sisi lain, keadaan perekonomian Kota Surabaya meskipun dalam keadaan pandemi akan tetapi bisa bertahan dengan masih adanya sektor perdagangan besar hingga eceran, resparasi mobil dan sepeda motor, serta

¹¹¹Pewarto, "Target PAD Kota Batu 2020 Terlampaui, Sektor Pariwisata Sumbang 40 Persen", (<https://malangvoice.com>), pada 11 April 2022

¹¹²Budhi Santoso

¹¹³Dian Kurniawan, "Omset Menurun, Pemkot Surabaya Bebaskan Biaya Retribusi Sentra Kuliner", (<https://surabaya.liputan6.com>), pada 11 April 2022

penyediaan akomodasi dan minuman sehingga menyebabkan penerimaan retribusi daerah tetap terkendali.¹¹⁴

Menurut Munawir (1997) menyebutkan bahwa retribusi ialah iuran untuk pemerintah yang bisa dipaksakan dan jasa balik secara langsung yang bisa ditunjuk. Paksaan dalam hal ini merupakan sebuah sifat ekonomis dikarenakan orang atau badan yang tidak merasakan jasa balik yang diperoleh dari pemerintah maka tidak akan dikenakan penarikan retribusi tersebut.¹¹⁵ Penerimaan pada sektor retribusi daerah ini meskipun tidak seberapa banyak jika dibandingkan dengan sektor lainnya, hal tersebut dikarenakan sifat dari retribusi daerah ini ialah tidak wajib untuk seluruh masyarakat. Di mana hanya orang atau badan tertentu yang memanfaatkan fasilitas dari pemerintah tersebut yang dikenakan penarikan retribusi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilda Ellysa Putri & Sri Rahayu (2015) mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD (studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014) yang menyebutkan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Cirebon tahun 2010 hingga 2014. Sektor retribusi daerah pada

¹¹⁴Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur

¹¹⁵Damas Dwi Anggoro

Kabupaten Cirebon dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami perkembangan yang cukup meningkat.¹¹⁶

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Ni Luh Putu Ari Prayanti dan kawan-kawan (2014) mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2010 hingga 2013 yang menjelaskan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Badung tahun 2010 hingga 2013.¹¹⁷

C. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Sesuai dengan nilai t hitung pada variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sebanyak 16,36304 dan hasil probabilitas pada variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sebanyak 0,0003. Hasil probabilitas tersebut menunjukkan bahwa hasil tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikansi sebanyak 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima yang artinya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD.

¹¹⁶Meilda Ellysa Putri & Sri Rahayu. 2015. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)".*e-Proceeding of Management*, Vol 2, No. 1

¹¹⁷Ni Luh Putu Ari Prayanti dkk. 2014. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013".*Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol 2, No. 1

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 setiap tahunnya mengalami perkembangan yang meningkat. Provinsi Jawa Timur memiliki BUMD seperti PT. Sier, Bank Jatim, Perusahaan Daerah Air Bersih, dan lain-lain sebagainya.

Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang cukup besar senilai Rp417.764.005.747,60. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur hal tersebut dikarenakan adanya BUMD yang terus berkembang.

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 terendah ialah Kota Blitar dengan total Rp1.041.098.840,30. Terjadinya penurunan tersebut dikarenakan pendapatan dari sektor penyertaan modal di PD BPR Artha Praja yang menurun.¹¹⁸ Di sisi lain, hal tersebut sejalan dengan adanya penurunan target PAD dari Rp174.000.000.000,00 menjadi Rp108.000.000.000,00.¹¹⁹ Adanya penurunan target tersebut secara otomatis akan berdampak pada penerimaan sumber-sumber yang ada pada PAD.

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 tertinggi ialah

¹¹⁸Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Kota Blitar

¹¹⁹Pemerintah Kota Blitar

Kabupaten Bojonegoro dengan total sebesar Rp143.500.000.000,00. Hal tersebut sejalan dengan adanya kontribusi lebih dari sektor BUMD yaitu PT. Asri Dharma Sejahtera yang mengalami *Break Event Point* (BEP) sehingga penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Bojonegoro meningkat.¹²⁰ Di sisi lain, peningkatan perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 tersebut disebabkan adanya kontribusi dari BUMD seperti PT. Bank Jatim, PD BPR Bojonegoro, BPR Jawa Timur, dan lain-lain sebagainya.

Menurut Halim (2008) menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹²¹ Dalam hal ini adanya perusahaan milik daerah seperti BUMD, BUMN, dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mampu berkontribusi terhadap PAD di setiap daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kendy Rama Nuzulistyan dan kawan-kawan (2017) mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

¹²⁰Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, "Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA 2020", (<https://bpkad.bojonegorokab.go.id>), pada 13 Juni 2022

¹²¹Yusuf Hafandi & Romandhon

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 hingga 2015.¹²²

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Natasha Yokoansei Kireina dan Andri Octaviani (2021) mengenai analisis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Semarang tahun 2016 hingga 2019 yang menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Semarang tahun 2016 hingga 2019.¹²³

D. Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Sesuai dengan nilai t hitung pada variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah sebanyak 16,89602 dan hasil probabilitas pada variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah sebanyak 0,0000.

Hasil probabilitas tersebut menunjukkan bahwa hasil tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikansi sebanyak 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima yang artinya lain-lain

¹²²Kendy Rama Nuzulistyan dkk

¹²³Natasha Yokoansei Kireina dan Andri Octaviani. 2021. "Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019".Aktual, Vol 6, No. 2

pendapatan asli daerah yang sah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD.

Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020 setiap tahunnya mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tertinggi yaitu sebesar Rp3.255.809.637.717,81. Hal tersebut dikarenakan adanya kontribusi yang cukup banyak yang bersumber dari dinas-dinas daerah di setiap kabupaten/kota seperti imbalan yang diberikan oleh masyarakat atas pelayanan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.036.918.587.733,58 yang disebabkan adanya pandemi COVID-19. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bersumber dari perolehan penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan jasa giro, penerimaan denda pajak, dan lain-lain sebagainya.¹²⁴

Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang paling terendah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 ialah Kota Batu dengan total Rp14.340.000.000,00. Hal tersebut sejalan dengan adanya penurunan target PAD dari Rp207.000.000.000,00 menjadi

¹²⁴Kementerian Keuangan “Kajian Fiskal Regional Triwulan III 2019” (<https://djpb.kemenkeu.go.id>), pada 13 Juni 2022

Rp105.000.000.000,00.¹²⁵ Adanya penurunan target tersebut berdampak pada penerimaan sumber-sumber yang ada pada PAD seperti sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang paling tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 ialah Kabupaten Sidoarjo dengan total Rp772.697.026.904,70. Hal tersebut merupakan capaian yang luar biasa dikarenakan mampu melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp532.300.000.000,00 meskipun di sisi lain terjadi pandemi COVID-19.¹²⁶

Menurut Dhyni Inka Syafitri menyebutkan bahwa sektor lain-lain pendapatan asli daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan PAD yang disebabkan terdapatnya realisasi yang cukup besar.¹²⁷ Hal tersebut sesuai dengan adanya penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur disebabkan karena terdapatnya sub sektor pada sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menyebabkan penerimaan sektor tersebut melimpah yang akan mengakibatkan kepada peningkatan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hafandi dan Romandhon (2020) mengenai pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan

¹²⁵Firmansyah, "Akibat Covid-19, Proyeksi Pendapatan Kota Batu Menurun Drastis", (<https://kabarmalang.com>), pada 11 April 2022

¹²⁶Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur

¹²⁷Dhyni Inka Syafitri

lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap PAD Kabupaten Wonosobo yang menyebutkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Wonosobo tahun 2013 hingga 2017. Adanya peningkatan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di sisi lain, akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten Wonosobo.¹²⁸

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Dani Rachman dan kawan-kawan (2021) mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan yang sah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2011 hingga 2019.¹²⁹

E. Variabel yang Paling Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Sesuai dengan nilai beta pada uji koefisien beta maka dapat disimpulkan nilai absolut elastisitas paling besar ialah beta X4 atau variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan nilai absolut elastisitas sebesar 0,435. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah paling berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2020.

¹²⁸Yusuf Hafandi & Romandhon

¹²⁹Dani Rachman dkk. 2021. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung". Akurati Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, Vol 12, No. 3

Hal tersebut sejalan dengan adanya penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang cukup banyak seperti penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan laba yang berasal dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan denda yang disebabkan keterlembatan pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Jika sebuah sektor yang ada pada PAD banyak atau meningkat maka otomatis sektor tersebut akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizka Lutfita Novalistia (2016) mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yang menjelaskan bahwa variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki dominan paling berpengaruh yang cukup banyak terhadap penerimaan PAD pemerintahan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 hingga 2014.¹³⁰

Di sisi lain, hasil penelitian ini memiliki perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu, di mana penelitian yang dilakukan oleh Agus Prabawa (2009) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat PAD Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa retribusi daerah

¹³⁰Rizka Lutfita Novalistia. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah". *Journal Of Accounting*, Vol 2, No. 2

yang paling berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Banyumas tahun 2000 hingga 2007.¹³¹ Dapat disimpulkan adanya perbedaan karakter geografis pada sebuah wilayah akan berakibat kepada penerimaan daerah tersebut.

F. Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adanya perkembangan PAD yang meningkat merupakan cerminan bagi suatu daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 (Rupiah)

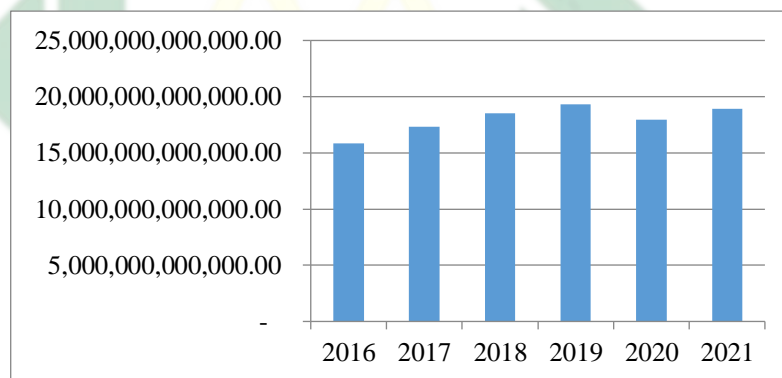
Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2016	15.817.795.024.797,00
2017	17.324.177.664.424,20
2018	18.531.062.021.823,40
2019	19.327.125.485.405,90
2020	17.951.235.057.953,00
2021	18.935.883.965.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2021

¹³¹Agus Prabawa. 2009. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas".Jurnal Ekonomika Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Vol 12, No. 3

Penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan PAD tertinggi ialah tahun 2019 sebesar Rp19.327.125.485.405,90. Hal tersebut dikarenakan adanya kontribusi lebih dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor yang disebabkan adanya program pemutihan pajak. Perkembangan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik 5.1.

Grafik 5.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2016-2021 (data diolah)

Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan PAD Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pendapatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp17.951.235.057.953,00.

Pada tahun 2021 penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp18.935.883.965.000,00. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan seiring

dengan pemulihan ekonomi, menurunnya kasus COVID-19, dan tingkat vaksinasi yang cepat serta progresif di Provinsi Jawa Timur meskipun masih terjadi pandemi COVID-19. Di sisi lain, hal ini merupakan capaian yang luar biasa dikarenakan mampu melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar Rp17.100.000.000.000,00. Penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 terbesar berasal dari sektor pajak kendaraan bermotor dengan jumlah Rp6.800.000.000.000,00.¹³²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³² Peni Widarti, "Pendapatan Daerah Jatim 2021 Terealisasi Rp. 32,9 Triliun", (<https://surabaya.bisnis.com>), pada 14 Juni 2022

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil serta pembahasan pada penelitian ini guna menjawab rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang menunjukkan bahwa lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0,05.
2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0002 yang menunjukkan bahwa lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0,05.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0003 yang menunjukkan bahwa lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0,05.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan

nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0,05.

5. Variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah paling berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai absolut elastisitas sebesar 0,435.

B. Saran

Sesuai dengan hasil serta pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk pemerintah daerah serta peneliti selanjutnya. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu untuk meningkatkan PAD dengan cara memperluas sumber-sumber penerimaan yang ada pada PAD melalui identifikasi dan menetapkan besaran tarif penarikan pada sumber-sumber PAD dengan menyesuaikan pada kondisi geografis daerah setempat.
2. Pemerintah daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan menjalin kerja sama dengan *e-commerce* dan mitra jaringan *retail* seperti Indomaret serta Alfamart guna memudahkan masyarakat dalam membayar penarikan daerah seperti membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai langkah inovasi dalam bidang teknologi sehingga mampu untuk meningkatkan PAD daerah setempat.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan penelitian tentang PAD dengan menggunakan data waktu penelitian yang lebih lama agar dapat mengetahui bagaimana perkembangan sumber-sumber PAD dari tahun ke tahun serta pengaruhnya terhadap PAD.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Halim. (2003). Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 7, No. 1
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Agus, I Sudarmana Putu & Gede Mertha Sudiarta. (2020). “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah”. *E-Jurnal Manajemen*, Vol 9, No. 4. 1338-1357
- Amin, Fadillah. *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Prespektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. Malang: UB Press, 2019
- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017
- Ansofino dkk et al. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Apriani, Wahyu dkk et al. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Journal Of Accounting*, Vol 3, No. 3
- Arenawati. *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi 2*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2016
- Astuti, Alfira Mulya. (2010). *Fixed Effect Model Pada Regresi Data Panel*. Beta, Vol 3, No. 2. 134-145
- Audi, Gilas. “10 BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur”, (<https://jatimnet.com/10-bumd-pemerintah-provinsi-jawa-timur>), pada 21 Desember 2021
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, “Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Turun Hingga Rp 583,4 Miliar”, (<https://jatim.bpk.go.id>), pada 13 Juni 2022
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, “Tutup Tahun 2019, Total Realisasi PAD Jatim dari Pajak Daerah Capai 104,27%”, (<https://www.dipendajatim.go.id>), pada 13 Juni 2022
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, “Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA 2020”, (<https://bpkad.bojonegorokab.go.id>), pada 13 Juni 2022
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Jumlah Penduduk Provinsi (Jiwa), 2018-2020” (www.jatim.bps.go.id), pada 16 Maret 2022

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota (km²), 2016-2020” (www.jatim.bps.go.id), pada 14 Juni 2022
- Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur, “BUMD Jatim”, (<https://bumd.jatimprov.go.id>), pada 13 Juni 2022
- Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, “Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2021”, (<https://www.bi.go.id>), pada 13 Juni 2022
- BPS Jawa Timur, “Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Pendapatan di Provinsi Jawa Timur, 2016-2020”, (<https://jatim.bps.go.id>), pada 12 Februari 2022
- Damayanti, Theresia Woro dan Supramono. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi, 2005
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, “Tahun 2019, Total Realisasi dari Pajak Daerah Jatim Capai 104,27 Persen”, (<http://kominform.jatimprov.go.id>), pada 13 Juni 2022
- DJPK Kemenkeu, (<https://djpk.kemenkeu.go.id>) pada 28 Januari 2022
- Fadli, Ardiansyah. “Bagaimana Cara Menghitung BPHTB Saat Beli Rumah? Simak di Sini”, (<https://www.kompas.com>), pada 13 Juni 2022
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2006
- Firdausy, Carunia Mulya. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Firmansyah, “Akibat Covid-19, Proyeksi Pendapatan Kota Batu Menurun Drastis”, (<https://kabarmalang.com>), pada 11 April 2022
- Gujarati, Damodar N. dan dawn C, Porter, *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012
- Hafandi, Yusuf & Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap PAD Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, Vol 3, No. 2. 182-191
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai, 2004
- Hasibuan dkk et al. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Se Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

- Heryanto, “Dampak COVID-19, PAD Kota Batu Hilang Rp 80,8 Miliar”, (<https://jatimtimes.com>), pada 13 Juni 2022
- Kementerian Keuangan “Kajian Fiskal Regional Triwulan III 2019” (<https://djpb.kemenkeu.go.id>), pada 13 Juni 2022
- Khusaini, Moh. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press, 2018
- Kireina, Natasha Yokoansei dan Andri Octaviani. (2021). “Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019”. *Aktual*, Vol 6, No. 2. 32-37
- Kurniawan, Dian, “Lebih Target, Realisasi Pendapatan Daerah Jatim 2020 Capai 104,94 Persen”, (<https://surabaya.liputan6.com>), pada 12 Februari 2022
- Kurniawan, Dian, “Omset Menurun, Pemkot Surabaya Bebaskan Biaya Retribusi Sentra Kuliner”, (<https://surabaya.liputan6.com>), pada 11 April 2022
- Kuswoyo dkk et al. (2015). Perkembangan Keuangan Daerah di Jawa Timur pada Masa Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 3, No. 12. 2065-2069
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002
- Marita, Ni Made & Ketut Alit Suardana. (2016). Pengaruh Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 14, No. 1. 53-65
- Mashabi, Sania, “25 Tahun Otonomi Daerah, Mendagri Sebut Banyak Daerah yang PAD Lebih Transfer Pusat)”, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/27/11502621/25-tahun-otonomi-daerah-mendagri-sebut-banyak-daerah-yang-pad-lebih>), pada 20 Desember 2021
- Mariyanto, Joko. (2015). “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol 11, No. 1
- Meilisa, Hilda, “Realisasi Pajak Daerah Jatim di Tahun 2019 Capai 15 Triliun”, (<https://news.detik.com>), pada 9 Maret 2022
- Nggilu, Fadly. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 16, No. 4. 623-635
- Novalistia, Rizka Lutfita. (2016). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Tengah”. *Journal Of Accounting*, Vol 2, No. 2

- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007
- Nuryanto & Zlfikar Bagus Pambuko. *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi*. Magelang: UNIMMA PRESS, 2018
- Nuzulistyan, Kendy Rama dkk et al. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*, Vol 3, No. 3
- Oktavia, Cindi & Nur Handayani. (2021). Pengaruh PAD, *Tax Effort*, Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 10, No. 3. 1-20
- Panjawa, Jihad Lukis & RR Retno Sugiharti. *Pengantar Ekonometrika Dasar Teori dan Aplikasi Praktis Untuk Sosial-Ekonomi*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2021
- Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Kota Blitar, “ Pemerintah Kota Blitar Catatan Atas Laporan Keuangan”, (<http://ppid.blitarkota.go.id/dokumen>), pada 13 Juni 2022
- Pemerintah Kota Blitar, “Dampak Wabah Corona, PAD Kota Blitar Turun 66 Miliar Rupiah”, (<https://covid19.blitarkota.go.id>), pada 14 Juni 2022
- Pemkab Bojonegoro, “Badan Usaha Milik Daerah”, (<https://bojonegorokab.go.id>), pada 16 Maret 2022
- Pewartar, “Target PAD Kota Batu 2020 Terlampaui, Sektor Pariwisata Sumbang 40 Persen”, (<https://malangvoice.com>), pada 11 April 2022
- Prabawa, Agus. (2009). “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas”. *Jurnal Ekonomika Universitas Wijayakusuma Purwokerto*, Vol 12, No. 3. 2371
- Prasetyono, Dwi Sunar. *Buku Pintar Pajak*. Jogjakarta: Laksana, 2012
- Prayanti, Ni Luh Putu Ari dkk. (2014). “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013”. *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol 2, No. 1.
- Portal APBD Kota Bandung, “Data APBD Kota Bandung”, (<http://data.bandung.go.id>), pada 8 Februari 2022
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: CV Wade Group, 2017
- Putri, Meilda Ellysa & Sri Rahayu. (2015). “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)”. *e-Proceeding of Management*, Vol 2, No. 1

- Rachman, Dani dkk. (2021). “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”. *Akurati Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, Vol 12, No. 3. 37-48
- Rahardian, Fajar. *Efek Daya Tarik Promosi dan Komunitas terhadap Minat Pembelian Mobil Suzuki Ertiga di Jawa Timur*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Rahmayani, Diah. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten 2015-2018*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Ramadhan, Maulana, “Catat, Ini Cara Menghitung Besaran PBB”, (<https://www.kompas.com>), pada 13 Juni 2022
- Ramadhan, Puja Rizky. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, Vol 5, No. 1. 81-87
- Safarina, Hamida Amri, “Pengambilan Air Tanah Juga Kena Pajak, Sudah Tahu? Begini Aturannya”, (<https://news.ddtc.co.id>), pada 31 Januari 2022
- Santoso, Budhi, “Pelaku Usaha Sektor Pariwisata di Kota Batu Terima BST”, (<https://www.antaranews.com>), pada 13 Juni 2022
- Sari, Elvira Inda, “Komisi C Optimis PAD Jatim 2018 Meningkatkan”, (<https://infopublik.id>), pada 12 Februari 2022
- Setiawan, Kodrat, “Target Pendapatan Asli Daerah Surabaya Bakal Direvisi”, (<https://bisnis.tempo.co>), pada 9 Maret 2022
- Sidin, Tinko, “Akibat Covid-19, Proyeksi Pendapatan Kota Batu Menurun Drastis”, (<https://kabarmalang.com>), pada 11 April 2022
- Simanjuntak, Timbul Hamogan dan Mukhlis Imam. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012
- Sudaryo, Yoyo dkk et al. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2017
- Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo, 2008
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016
- Suharyadi, Dedi dkk et al. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, Vol 5, No. 2. 125-130

- Susyanti, Jeni dan Dahlan Ahmad. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media, 2016
- Syafitri, Dhiny Inka. *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Tjahyono, Muhammad Bayu, “Reformasi Pajak Rakyat Dapat Apa”, (www.pajak.go.id), pada 20 Desember 2021
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia Edisi 10* . Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Widarti, Peni, “Dampak Covid-19, PAD Jatim Diperkirakan Turun 30 Persen”, (<https://surabaya.bisnis.com>), pada 16 Maret 2022
- Widarti, Peni, “Pendapatan Daerah Jatim 2021 Terealisasi Rp. 32,9 Triliun”, (<https://surabaya.bisnis.com>), pada 14 Juni 2022
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Zamachsari, “PAD Sampang 2020 Anjlok”, (<https://beritajatim.com>), pada 9 Maret 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A